

KAWASAN KONSERVASI LAUT, REKATKAN KEDAULATAN, TUMBUHKAN KESADARAN POLITIK BANGSA, SATUKAN KEPULAUAN BERWAWASAN NUSANTARA¹

PENDAHULUAN

Wawasan Nusantara (Wasantara) merupakan landasan visional yang bermakna cara pandang Bangsa Indonesia sebagai pedoman untuk mendayagunakan seluruh potensi nasionalnya dalam mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keamanan pada NKRI guna membangun ketahanan nasional. Wasantara dalam pandangan geopolitik Indonesia menetapkan rambu-rambu dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, juga dalam upayanya menjaga tetap satu kesatuan Ipoleksosbudhankam untuk mencapai tujuan nasional². Wasantara memandang konstelasi geografi Indonesia sebagai lautan yang ditaburi pulau-pulau, maknanya adalah lautan bukanlah pemisah namun justru sebagai perekat. Jadi Wasantara mengandung makna Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh menyeluruh antara daratan dan lautan (secara geografi dan geopolitik), dan satu kesatuan ekonomi serta sumberdaya kekayaan alam yang teramat penting untuk diimplementasikan dalam pengelolaan wilayah NKRI, khususnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Nusantara.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia memiliki 17.504³ pulau besar dan kecil, terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, disebut juga sebagai Nusantara. Dengan garis pantai sepanjang 95.181 km dan luas daratan hanya 1,9 juta km², maka 75% wilayah Indonesia berupa lautan dengan potensi sumberdaya. Salah satu sumberdaya hayati dengan keanekaragamannya, diantaranya adalah ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove dan berbagai jenis ikan, serta potensi jasa lingkungan kelautan yang sangat prospektif mendukung perekonomian masyarakat yaitu pengembangan pariwisata bahari dan jasa perhubungan laut. Potensi sumberdaya pesisir dan laut yang melimpah, sampai saat ini masih belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat masih bergelut dengan kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan kualitas kesehatan yang kurang baik serta cenderung dalam ketidakberdayaan menghadapi berbagai masalah. Demikian pula dalam sistem perpolitikan, masyarakat pada umumnya memiliki kesadaran politik yang rendah yang berdampak pada kurangnya partisipasi politik yang dapat mengancam ketahanan nasional bangsa. Kemiskinan dan rendahnya tingkat pemahaman terhadap pelestarian lingkungan, menjadi salah satu pembeda tingginya ketergantungan masyarakat pesisir terhadap sumberdaya laut yang tidak memperhatikan kelestarian sumberdaya, sehingga dapat mengakibatkan

¹ Adaptasi dari tugas karya perorangan Dr. Toni Ruchimat yang berjudul "implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan guna membangun kesadaran politik masyarakat pesisir dalam rangka Ketahanan Nasional", Lemhannas 2012

² Tim Pokja Wawasan Nusantara, 2012, "BS Geopolitik dan Wawasan Nusantara modul 1 dan 2, Sub BS Geopolitik Indonesia", Lemhannas RI, 2012

³ Departemen Dalam Negeri tahun 2004 dalam [http://id.m.wikipedia.org/wiki/ Daftar pulau di Indonesia#cite_ref-0](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_di_Indonesia#cite_ref-0) diakses pada tanggal 15 Juli 2012

penurunan fungsi, kualitas, dan keanekaragaman hayati. Selain itu, orientasi pembangunan yang masih cenderung ke daratan dan belum sepenuhnya berorientasi ke lautan menyebabkan potensi laut seolah masih sekedar kekayaan bangsa yang terpendam dan belum mampu mensejahterakan masyarakatnya.

Konsep Negara Kepulauan (Nusantara) memberikan kita anugerah yang luar biasa. Hal ini merupakan salah satu konsep Wawasan Nusantara yang diperjuangkan melalui Deklarasi Djuanda. Indonesia tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, tetapi juga negara dengan 2/3 wilayahnya merupakan wilayah perairan. Wilayah perairan Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya laut yang potensial, baik hayati dan nonhayati. Sebelum Indonesia menegara, banyak kejayaan maritim nusantara yang tergolong spektakuler berkaitan dengan perdagangan dan transportasi, seperti pada jaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sejalan dengan itu bangsa-bangsa Eropa melakukan imperialisme di benua-benua baru dengan memanfaatkan jalur laut yang dipelopori Raja Portugis. Inggris, Portugis, Spanyol dan Belanda merupakan Negara-negara Eropa pertama yang memanfaatkan imperialisme dan kolonialisme itu. Keadaan ini berkaitan erat dengan politik Belanda/*Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) untuk memegang monopoli perdagangan rempah-rempah dan produk pertanian dengan menguasai wilayah Indonesia. *Culture Stelsel* yang ditanamkan oleh Belanda terhadap bangsa Indonesia demikian melekat sampai sekarang. Perhatian bangsa Indonesia terhadap perairan semakin memudar. Ini terbukti dengan adanya visi dan kebijakan pembangunan saat ini lebih berpihak pada pembangunan kontinental bahkan adanya pengakuan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa Agraris. Artinya Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa terhadap lingkungannya belum sepenuhnya diimplementasikan dalam pengelolaan wilayah NKRI sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan yang utuh menyeluruh antara daratan dan lautan (secara geografi dan geopolitik). Padahal dalam perkembangan lingkungan strategis, hingga saat ini penguasaan atas wilayah perairan masih tetap eksis.

Implementasi wawasan terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam konteks implementasi sistem politik yang demokratis di Indonesia yang mampu menumbuhkan kesadaran politik masyarakat pesisir, maka upaya untuk menuju kondisi di atas, memerlukan dukungan mutlak dari terwujudnya konsolidasi demokrasi yang berkualitas dari pemerintah sebagai pemimpin nasional yang visioner dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan politik yang dikemukakan oleh Alfian⁴ dalam bukunya *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, sebagai berikut: "Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak

⁴ Alfian, 1986, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Hlm. 235.

dibangun". Sedangkan menurut Instruksi Presiden No. 12 tahun 1982 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi muda adalah sebagai berikut: "Pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien". Dengan demikian pendidikan politik adalah proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan berencana dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa (*national character building*)⁵. Pendidikan politik merupakan dasar yang penting dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini telah ditanamkan sejak awal bangsa Indonesia menegara, tujuan utama politik bangsa ini telah dicantumkan dalam UUD NRI 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keberhasilan pendidikan politik yang baik ditingkat masyarakat pesisir diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran politik yang pada akhirnya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya konservasi perairan yang mensejahterakan.

Menyikapi kondisi tersebut dikaitkan dengan perkembangan lingkungan strategis, diharapkan adanya strategi yang komprehensif untuk mengelola kawasan konservasi perairan yang dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan kesadaran politik masyarakat pesisir dan ketahanan nasional. Konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Kawasan konservasi perairan didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan⁶. Sistem zonasi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan ini membuka ruang pemanfaatan perikanan maupun pemanfaatan berkelanjutan lainnya bagi masyarakat, yang sekaligus menegaskan bahwa paradigma konservasi tidak hanya perlindungan namun juga terbuka untuk pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. Luas Kawasan konservasi perairan saat ini mencapai 15,7 juta hektar yang tersebar di berbagai kabupaten/kota Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan upaya pengelolaan yang efektif untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan. Selain itu perlu diperkuat jejaring pengembangan kawasan di wilayah-wilayah politik strategis bernilai konservasi, diantaranya di pulau-pulau terluar. Peran kawasan konservasi

⁵ Endang Sumantri, *Upaya Membangkitkan Nasionalisme Melalui Pendidikan*, Jurnal Negarwan, Setneg RI

⁶ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, Pasal 1.

dalam pandangan geopolitik Indonesia sangat strategis dalam rangka pengikat kesatuan potensi dan keanekaragaman hayati perairan laut dan kepulauan Indonesia, sehingga pemanfaatannya dapat seoptimal mungkin untuk hajat hidup masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kawasan konservasi perairan dalam pandangan wawasan nusantara diimplementasikan dalam optimalisasi potensi sumberdaya laut menjadi penggerak ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat dan sekaligus meningkatkan kesadaran politik masyarakat pesisir. Kawasan konservasi mampu mengokohkan status hukum kewilayahan utamanya bagi wilayah pulau-pulau kecil terluar yang rentan dari ancaman disintegrasi dan penguasaan negara lain. Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka perlu adanya kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan potensi perairan serta sumber daya manusia yang berkompeten dibidang pengelolaan kawasan perairan, yang terintegrasi menjadi satu kesatuan ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan guna membangun kehidupan sosial. Untuk meningkatkan partisipasi dan kreativitas masyarakat pesisir dalam mengelola kawasan konservasi perairan perlu adanya pendampingan dan fasilitator bagi kemajuan dan keberlanjutan kelestariannya. Sedangkan untuk pengalokasian program yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat pesisir diperlukan adanya aparat yang berkompeten dalam mengaktualisasikan sistem zonasi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan terhadap pembangunan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, melalui implementasi Wawasan Nusantara terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan diharapkan mewujudkan terbangunnya kesadaran politik masyarakat pesisir yang pada akhirnya dapat mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh.

Dari pembahasan tersebut diatas kiranya diperlukan sebuah konsepsi: "Bagaimana implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan guna membangun kesadaran politik masyarakat pesisir dalam rangka Ketahanan Nasional"

KONDISI IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA TERHADAP PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN: IMPLIKASI DAN PERMASALAHAN

Wawasan Nusantara dalam pandangan geopolitik Indonesia menetapkan rambu-rambu dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, juga dalam upayanya menjaga tetap satu kesatuan Ipoleksosbudhankam untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memandang konstelasi geografi Indonesia sebagai lautan yang ditaburi pulau-pulau, maknanya adalah lautan bukanlah pemisah namun justru sebagai perekat menjadi satu kesatuan yang utuh menyeluruh antara daratan dan lautan (secara geografi dan geopolitik), dan satu kesatuan ekonomi serta sumberdaya kekayaan alam yang teramat penting untuk diimplementasikan dalam pengelolaan wilayah NKRI, khususnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Nusantara.

Potensi sumberdaya pesisir dan laut yang melimpah, sampai saat ini masih belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat khususnya

masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat masih bergelut dengan kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan kualitas kesehatan yang kurang baik serta cenderung dalam ketidakberdayaan menghadapi berbagai masalah. Demikian pula dalam sistem perpolitikan, masyarakat pada umumnya memiliki kesadaran politik yang rendah yang berdampak pada kurangnya partisipasi politik yang dapat mengancam ketahanan nasional bangsa.

Kemiskinan dan rendahnya tingkat pemahaman terhadap pelestarian lingkungan, menjadi salah satu pembenaran tingginya ketergantungan masyarakat pesisir terhadap sumberdaya laut serta tidak memperhatikan kelestarian sumberdaya, sehingga dapat mengakibatkan penurunan fungsi, kualitas, dan keanekaragaman hayati. Selain itu, orientasi pembangunan yang masih cenderung ke daratan dan belum sepenuhnya berorientasi ke lautan menyebabkan potensi laut seolah masih sekedar kekayaan bangsa yang terpendam dan belum mampu mensejahterakan masyarakatnya.

Kondisi Implementasi Wawasan Nusantara terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Saat Ini . Konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Data Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI), Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa sampai pertengahan tahun 2012 terdapat sekitar 15,7 juta hektar kawasan konservasi perairan laut di Indonesia. Kawasan konservasi perairan maupun kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkembang di Indonesia niscaya tidak hanya terhenti dalam capaian luasan semata, namun pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan yang “efektif” adalah harapan yang senantiasa terus digapai perwujudannya, hingga pada akhirnya tercapai kesejahteraan masyarakat sebagai manfaat pengelolaan kawasan konservasi yang lestari.

TABEL 1. STATUS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI INDONESIA

Nomor	Kategori	Jumlah	Luas (Ha)
A	Inisiasi Kementerian Kehutanan	32	4,694,947.55
1	Taman Nasional Laut	7	4,043,541.30
2	Taman Wisata Alam Laut	14	491,248.00
3	Suaka Margasatwa Laut	5	5,678.25
4	Cagar Alam Laut	6	154,480.00
B	Inisiasi Kementerian Kelautan & Perikanan, dan Pemerintah daerah	76	11,089,181.97
1	Taman Nasional Perairan	1	3,521,130.01
2	Suaka Alam Perairan	3	445.630,0
3	Taman Wisata Perairan	6	1,541,040.20
4	Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)	66	5,581,381.76
Total		108	15,784,129.52

Sumber: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan - KemenKP, 2012

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan berpedoman pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mengacu pada rencana strategis pada tingkat Direktorat Jenderal kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau

Kecil. Sasaran program kegiatan dalam 5 tahun (2010 – 2014) adalah Terkelolanya kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan seluas 4,5 juta hektar. serta bertambahnya 2 juta hektar, secara kumulatif menjadi 15,5 juta hektar kawasan konservasi perairan di Indonesia.

TABEL 2. TARGET PENGELOLAAN EFEKTIF KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN TAHUN 2010-2014

No.	Lokasi>Nama KKP	Luas (Ha)	Tingkat e-KKP			Keterangan
			Awal-2011	target-2012	target-2014	
1	KKPN/TNP Laut Sawu, NTT	3,521,130.01	MERAH	KUNING	HIJAU	KKJI+UPT
2	KKPN/TWP Gili Matra, NTB	2,954.00	MERAH	KUNING	HIJAU	KKJI+UPT
3	KKPN/TWP Laut Banda, Maluku	2,500.00	MERAH	KUNING	HIJAU	KKJI+UPT
4	KKPN/TWP P. Pieh, Sumbar	39,900.00	MERAH	KUNING	HIJAU	KKJI+UPT
5	KKPN/TWP Padaido, Papua	183,000.00	MERAH	KUNING	HIJAU	KKJI+COREMAP+UPT
6	KKPN/TWP Kapoposang, Sulsel	50,000.00	MERAH	KUNING	HIJAU	KKJI+COREMAP+UPT
7	KKPN/SAP Aru Tenggara, Maluku	114,000.00	MERAH	MERAH	KUNING	KKJI+UPT
8	KKPN/SAP Raja Ampat, Papua Barat	60,000.00	MERAH	MERAH	KUNING	KKJI+COREMAP+UPT
9	KKPN/SAP Waigeo, Papua Barat	271,630.00	MERAH	KUNING	HIJAU	KKJI+COREMAP+UPT
10	KKLD/Raja Ampat, Papua Barat	970,900.00	MERAH	KUNING	HIJAU	KKJI+COREMAP+UPT+PEMDA
11	KKLD/Sukabumi, Jawa Barat	1,771.00	KUNING	HIJAU	BIRU	KKJI+PEMDA
12	KKLD/Berau, Kaltim	1,271,749.00	MERAH	KUNING	HIJAU	KKJI+PEMDA
13	KKLD/Pesisir Selatan, Sumbar	733.00	MERAH	MERAH	KUNING	KKJI+PEMDA
14	KKLD/Bonebolango, Gorontalo	2,460.00	MERAH	MERAH	KUNING	KKJI+PEMDA
15	KKLD/Batang, Jawa Tengah	6,800.00	MERAH	KUNING	HIJAU	KKJI+PEMDA
16	KKLD/Lampung Barat, Lampung	14,866.87	MERAH	KUNING	HIJAU	KKJI+PEMDA
17	KKLD/Alor, NTT	400,008.30	MERAH	MERAH	KUNING	KKJI+PEMDA
18	KKLD/Indramayu, Jawa Barat	720.00	MERAH	MERAH	KUNING	KKJI+PEMDA
19	KKLD/Batam, Kepri	66,867.00	MERAH	KUNING	KUNING	KKJI+PEMDA
20	KKLD/Bintan, Kepri	472,905.00	MERAH	KUNING	KUNING	KKJI+PEMDA
21	KKLD/Natuna, Kepri	142,997.00	MERAH	KUNING	KUNING	KKJI+PEMDA
22	KKPN/Anambas, Kepri	1,262,686.20	MERAH	MERAH	KUNING	KKJI+PEMDA
	KKP Lainnya (54-12 = 42 KKP)	1,842,960.27	MERAH	KUNING	KUNING	KKJI+PEMDA
	JUMLAH	10,703,537.65				

Sumber: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2012

Pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan (KKP) merupakan target utama dalam pengembangan kawasan konservasi perairan, metode evaluasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (**E-KKP3K**) sedang dikembangkan oleh kementerian kelautan dan perikanan. Evaluasi efektivitas tersebut secara ringkas memuat tingkat keefektifan pengelolaan dari berbagai aspek, meliputi: tahapan pengelolaan, aspek ekologis, aspek sosial ekonomi dan budaya, dan aspek penatakelolaan kawasan konservasi perairan. Secara ringkas, terdapat lima level (tingkat) pengelolaan, yaitu: **MERAH**: (Level 1), merupakan kawasan konservasi perairan telah diinisiasi, dievaluasi dengan Pencadangan (SK); **KUNING**: (Level 2) kawasan konservasi perairan didirikan, tersedia: lembaga pengelola, rencana pengelolaan dan zonasi; **HIJAU** (Level 3); kawasan konservasi perairan dikelola minimum, tersedia: lembaga pengelola, rencana pengelolaan dan zonasi, penguatan Kelembagaan dan SDM, Infrastruktur dan peralatan, upaya-upaya pokok pengelolaan KKP; **BIRU** (Level 4), kawasan konservasi perairan dikelola optimum, pengelolaan KKP telah berjalan baik; dan **EMAS**: (Level 5) kawasan konservasi perairan mandiri, pengelolaan KKP telah berjalan baik dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan kawasan konservasi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang rawan disintegrasi dan terjadi pelanggaran hukum, *illegal fishing* maupun eksploitasi sumberdaya yang berlebih yang mengancam degradasi sumberdaya lingkungan masih belum optimal dilakukan. Selain itu, pengelolaan efektif kawasan konservasi yang tidak dapat dilepaskan dari tiga pilar utamanya, yakni perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan. Penguatan status hukum kawasan di tingkat internasional juga tidak kalah penting dalam upaya mengatasi segala ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan yang mengancam kedaulatan wilayah laut dan perairan Indonesia. Sampai saat ini kawasan-kawasan konservasi yang ada di Indonesia belum masuk dalam peta laut - pelayaran internasional, sehingga kawasan konservasi rawan terhadap pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan zonasinya.

Program-program strategis untuk mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan, efektif dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat terus dilakukan melalui berbagai upaya pokok pengelolaan kawasan konservasi, antara lain: perlindungan habitat dan populasi biota perairan, rehabilitasi habitat dan populasi biota perairan, penelitian dan pengembangan, pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan kerjasama dan/jejaring konservasi. Program inisiasi dalam rangka percepatan pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk mendukung perikanan berkelanjutan dalam hal fasilitasi penguatan rencana pengelolaan, kelembagaan, pembangunan infrastruktur kawasan maupun pengembangan sistem pengelolaan kawasan yang terpadu juga terus dilakukan baik berupa pilot project/program percontohan maupun melalui dukungan tugas pembantuan, dekonsentrasi, dana alokasi khusus, kemitraan, kerjasama serta komitmen pendanaan yang berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Program-program percontohan dalam rangka mendorong upaya pemanfaatan kawasan konservasi untuk perikanan berkelanjutan, pariwisata berbasis konservasi maupun aspek pemanfaatan lainnya terus ditingkatkan. Pada akhirnya, semangat mengelola kawasan konservasi yang terus tumbuh dan semakin efektif, selanjutnya akan dinilai dan dapat diberikan apresiasi/penghargaan. Anugerah Kawasan Konservasi Perairan (KKP Awards) secara tersendiri ataupun menjadi satu kesatuan dengan program lainnya merupakan pemberian penghargaan sebagai apresiasi untuk mendorong pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif.

Tujuan pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) yang dikelola berdasarkan sistem zonasi dan upaya ini sedikitnya dapat dilakukan melalui tiga strategi pengelolaan, yaitu: (1) Melestarikan lingkungannya, melalui berbagai program konservasi, (2) menjadikan kawasan konservasi sebagai penggerak ekonomi, melalui program pariwisata alam perairan dan pendanaan mandiri yang berkelanjutan, dan (3) pengelolaan kawasan konservasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang mensejahterakan masyarakat.

Pengelolaan KKP mengedepankan akan adanya filosofi pelestarian

dan pemanfaatan sumberdaya kekayaan alam (SKA) untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melalui kerjasama yang erat berbagai *stakeholders* dalam mencapai tujuan bersama yaitu terwujudnya kemakmuran penduduk (demografi). Adanya kerjasama yang erat antara berbagai pihak baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah, maka akan menciptakan kondisi yang kondusif, demi terciptanya integrasi nasional. Pemerintah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama untuk menciptakan adanya keseimbangan aspek ekonomi dan ekologi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan nasional.

Implementasi wawasan nusantara tak pelak harus bertolak dari berkeyakinan ideologis dan nasionalisme yang kukuh serta perlu didukung oleh usaha-usaha pemantauan sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai implikasi situasi serta kondisi yang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri. Operasionalisasi pengelolaan KKP tersebut dapat meningkatkan pemahaman cara pandang yang berimplikasi kepada peningkatan kesadaran masyarakat pesisir sehingga pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan nasional. Upaya ini dapat dijadikan alat mempersatukan bangsa (integrasi nasional) dari potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan dari dalam dan luar negeri. Dengan terciptanya integrasi nasional yang baik, pemahaman masyarakat yang tinggi, kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat, maka akan meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa, sehingga dapat meminimalisasi konflik-konflik yang mungkin dapat terjadi di masyarakat.

Kondisi implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan saat ini terhadap kesadaran politik masyarakat pesisir dan ketahanan nasional ditinjau dari aspek astagatra, antara lain sebagai berikut: **(a) Geografi.** Secara geografis, luas wilayah (perairan) teritorial Indonesia mencapai 3,1 juta km². Dalam perspektif pengelolaannya, seluruh wilayah perairan Indonesia dibagi menjadi 11 (sebelas) WPP (wilayah pengelolaan perikanan), meliputi perairan teritorial dan perairan ZEE (zona ekonomi eksklusif). Para ahli konservasi keanekaragaman hayati telah memprioritaskan wilayah pengembangan kawasan konservasi di Indonesia dibagi berdasarkan 12 (dua belas) wilayah bioekoregion. Dari wilayah yang seluas ini, upaya konservasi baru mencapai 5%, masih belum optimal sebagai penopang kesatuan wilayah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dimana dunia sepakat untuk mengkonservasi wilayah seluas setidaknya 10% dari wilayah perairan negara, artinya Indonesia mempunyai kewajiban mendukung keseimbangan pembangunan di wilayah lautnya dengan menetapkan kawasan konservasi hingga 31 juta hektar.

Kondisi wilayah Indonesia yang multipotensi ini semakin diperkuat dengan letak Indonesia diposisi silang samudera dan benua. Ditinjau dari sebaran pulau-pulau yang mengikat nusantara, terdapat 92 pulau terluar. Perbatasan wilayah NKRI di daratan berbatasan dengan 3 negara dan di laut berbatasan dengan 10 negara. Potensi wilayah ini belum secara merata terkelola dengan baik, di sebagian wilayah terjadi *overfishing* dan di sebagian lainnya *underfishing*. Pengembangan kawasan konservasi sebagai penyeimbang pemanfaatan ekonomi dan lingkungan masih belum merata. Permasalahan internal, ditambah lagi dengan adanya pembagian

kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam pengelolaan di wilayah laut yang diatur oleh UU no. 32 tahun 2004. **(b) Demografi.** Data dan Informasi kondisi demografi saat ini telah memadai, namun belum terpetakan secara baik dan terperinci. Aspek demografi meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana merupakan aspek penting dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan data statistik tahun 2011, jumlah nelayan sebanyak 2.730.510 orang nelayan, jumlah pembudidaya 3.351.448 orang, jumlah kelompok rumah tangga perikanan (RTP), terdiri dari RTP nelayan 889,860 KK dan pembudidaya 1.667.949 KK (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011). Sebagian besar nelayan dan pembudidaya berpendidikan rendah dan mata pencaharian nelayan merupakan mata pencaharian pelarian, karena bekerja di tempat lain sulit.

Nelayan dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu nelayan artisanal yang menangkap ikan dalam satu hari kembali dengan daerah penangkapan di bawah 4 (empat) mil dari pantai, nelayan penangkap mingguan dengan kapal berukuran sampai dengan 30 GT (Gross Tonnage) serta nelayan andon yang melaut bulanan dengan ukuran kapal di atas 30 GT. Pada umumnya nelayan artisanal kondisi sosialnya paling rendah, karena pendapatannya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup harian. **(c) Sumber Kekayaan Alam.** Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara alami mempunyai lingkungan yang spesifik dan seimbang secara ekosistem dengan beragam potensi yang saling berhubungan dan sangat peka terhadap perubahan. Perubahan satu ekosistem dengan cepat akan mempengaruhi ekosistem lain di sekitarnya, sehingga diperlukan diperlukan kehati-hatian pengelolaannya, yaitu dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (*carrying capacity*) maupun lingkungan sosial budaya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ekosistem alami yang terdapat di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain adalah: terumbu karang (*coral reefs*), hutan mangrove, padang lamun (*seagrass beds*), pantai berpasir (*sandy beach*), pantai berbatu (*rocky beach*), formasi pescaprea, formasi baringtonia, estuaria, laguna, dan delta. Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa: kawasan pariwisata, kawasan budidaya (*marine culture*) dan kawasan pemukiman.

Sumberdaya alam di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari sumberdaya alam yang dapat pulih (*renewable resources*) dan sumberdaya alam yang tak dapat pulih (*non renewable resources*). Sumberdaya yang dapat pulih, antara lain: sumberdaya ikan, plankton, benthos, moluska, krustasea, mamalia laut, rumput laut atau *seaweed*, lamun atau *seagrass*, mangrove dan terumbu karang. Sedangkan, sumberdaya tak dapat pulih, antara lain: minyak dan gas, bijih besi, pasir, timah, bauksit, dan mineral serta bahan tambang lainnya.

Sumberdaya ikan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terkenal sangat tinggi, hal ini karena didukung oleh ekosistem yang kompleks sangat beragam. Perairan karang merupakan ekosistem yang subur yang banyak dihuni oleh beraneka ragam sumber hayati dan mempunyai keunikan dan keindahannya juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata bahari antara lain: sebagai parawisata selam, layar maupun *snorkling*.

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem utama pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat berperan baik bagi sumberdaya ikan di kawasan tersebut dan sekitarnya maupun bagi kelangsungan hidup ekosistem lainnya dan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Ekosistem mangrove juga dapat berfungsi sebagai penahan abrasi yang disebabkan oleh ombak dan gelombang, selain itu ekosistem mangrove secara ekonomi dapat dimanfaatkan kayunya sebagai kayu bakar, alat tangkap ikan dan bahan membuat rumah.

Ekosistem padang lamun seperti halnya dengan ekosistem lainnya yang ada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, memiliki fungsi ekologis yang cukup besar dan penting. Ekosistem padang lamun dihuni oleh berbagai jenis ikan dan udang, baik yang menetap, maupun yang bermigrasi ke padang lamun tersebut untuk mencari makan atau berlindung. Oleh karena itu, keberadaan padang lamun ini dapat menjadi salah satu indikator potensi sumberdaya ikan di kawasan tersebut.

Sumberdaya tak dapat pulih (*non-renewable resources*) dan energi kelautan, juga masih belum diusahakan optimal dan masih terbatas pada sumberdaya migas, timah, bauksit, dan bijih besi. Jenis bahan tambang dan mineral lain termasuk pasir kwarsa, fosfat, mangan, nikel, chromium dan lainnya praktis belum tersentuh. Demikian juga halnya dengan potensi energi kelautan, yang sesungguhnya bersifat tak pernah habis (*non-exhaustive*), seperti energi angin, gelombang, pasang surut, dan OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*).

Potensi lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti pariwisata bahari dan perhubungan laut, merupakan potensi yang mempunyai nilai tinggi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar maupun pendapatan nasional. Dengan keanekaragaman dan keindahan yang terdapat di pulau-pulau kecil tersebut merupakan daya tarik tersendiri dalam pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya di kawasan tersebut mestinya secara seimbang diiringi dengan upaya konservasi, sehingga dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan. (d) **Ideologi.** Karunia Sumber kekayaan alam kelautan dan perikanan serta potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum secara optimal dikelola secara seimbang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan tetap melestarikan sumberdayanya. Liberalisme perdagangan ikan dunia maupun tuntutan asing dalam melestarikan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai antisipasi dampak perubahan iklim sangat mempengaruhi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Disatu sisi keinginan untuk meningkatkan eksplorasi sumberdaya untuk pemenuhan perdagangan dunia, disisi lain kewajiban menyisihkan 10% wilayah perairan untuk konservasi juga harus dilaksanakan.

Konservasi dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilihat dari perspektif ideologi Pancasila masih belum sesuai dengan nilai-nilai praksis yang tersurat dalam sila ke tiga Persatuan Indonesia dan sila ke lima Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konflik horisontal antar kelompok nelayan dan antar daerah dalam perebutan wilayah tangkapan, klaim wilayah laut atas daerah tertentu, menunjukkan

belum melekatnya ideologi Pancasila dan belum dikedepankannya nilai persatuan.

Pemahaman Ideologi wilayah secara administratif dan secara ekologis sumberdaya ikan memang sangat kompleks, karena ikan bergerak dari satu daerah ke daerah lain, nelayan mencari ikan mengikuti daerah di mana ada ikan. Sementara euforia otonomi daerah ditafsirkan keliru, terutama pengkavlingan laut, seolah-olah wilayah laut adalah juga menjadi teritorial atau wilayah kedaulatan daerah. UU no 32 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa kewenangan daerah di wilayah laut adalah kewenangan pengelolaan administratif dan bukan kewenangan kedaulatan. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di satu sisi harus dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan, dimana tiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam menikmati potensi perikanan dan upaya pelestariannya. Di sisi lain pembangunan perikanan juga harus selalu berdasarkan kepada persatuan, karena wilayah perikanan adalah satu wilayah Indonesia sebagaimana prinsip nilai Wawasan Nusantara. (e) **Politik.** Pada umumnya kesadaran politik masyarakat masih rendah akibat kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan maupun konservasi, baik dalam hal pendidikan, penyadaran, sosialisasi, pembentukan kelembagaan masyarakat akan memberi dampak buruk pada kelancaran pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Kurangnya kesadaran sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban politik dalam pemerintahan juga melemahkan fungsi *check and balance* dari masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan kelautan dan konservasi sumberdaya ikan.

Lemahnya partisipasi politik dalam pengambilan keputusan pembangunan juga akan mengurangi kualitas kegiatan pembangunan yang dilakukan. Alokasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dampak dan manfaat pembangunan akan semakin jauh dirasakan oleh masyarakat.

Orientasi pembangunan masa lalu lebih difokuskan pada wilayah daratan (*mainland*) dan belum diarahkan pada potensi kelautan yang bertabur pulau-pulau sebagai pengerat nasionalisme wawasan nusantara, menunjukkan masih belum optimalnya implementasi wawasan nusantara, rendahnya komitmen dan *political will* dari pemerintah dalam konservasi sumberdaya ikan.

Dalam pelaksanaan peraturannya pun, sistem perundangan yang bersifat pengaturan pelaksanaan pembangunan di Indonesia menganut sektoral. Artinya suatu produk UU pada umumnya mengatur sektor, kemudian dijabarkan oleh PP, Perpres dan Permen yang sifatnya sektoral. Suatu masalah yang memerlukan konsolidasi kewenangan antar Lembaga setingkat Kementerian, biasanya diatur dalam PP, Perpres atau SKB Menteri, namun prakteknya sulit, karena ego sektoral masih sangat menonjol. (f) **Ekonomi.** Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam tataran pembangunan nasional saat ini masih menghadapi banyak tantangan, diantaranya tidak optimalnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pendapatan produk domestik bruto (PDB) dari hasil perikanan, jasa kelautan dan jasa lingkungan. Tidak optimalnya penyerapan tenaga kerja pada bidang pemanfaatan sumberdaya kelautan

dan perikanan, industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan, upaya konservasi kawasan perairan yang masih tidak optimal serta belum mendukung terciptanya pemanfaatan konservasi untuk jasa lingkungan.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sub-sektor perikanan tangkap selama periode 2005 – 2009 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, dengan rata-rata lebih dari 60 % per tahun. Namun upaya ini belum diikuti pemasukan negara yang secara kasat ditunjukkan dari penerimaan sektor pemanfaatan jasa lingkungan dan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemanfaatan jasa lingkungan yang diperoleh dari aktivitas wisata pesisir dan perairan, masih samar dan belum dihitung secara *rigid* sebagai masukan negara bukan pajak dari sektor kelautan dan perikanan.

Kondisi masyarakat nelayan artisanal dengan pemahaman pengelolaan wilayah/kawasan minim konservasi menyebabkan menurunnya hasil tangkapan nelayan. Tanpa keahlian dibidang lain, menambah lemahnya daya saing nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kesemuanya ini menjadi penyebab rendahnya pendapatan riil masyarakat, disamping belum terbukanya usaha alternatif untuk nelayan usaha kecil, menengah, koperasi dan masyarakat.

Kawasan konservasi perairan sejatinya menyumbang suplai sumberdaya ikan yang besar di wilayah tangkapan, yang saat ini masih belum dikelola dengan baik, sehingga belum dapat secara optimal mendukung industri perikanan dan memberikan sumber tangkapan ikan yang lestari bagi penopang perekonomian negara. (g) **Sosial Budaya.** Kondisi sosial budaya masyarakat tidak terlepas dari keberagaman dan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk. Berbagai persoalan pemerataan dan kesenjangan senantiasa muncul dikalangan masyarakat, meliputi tidak meratanya distribusi manfaat sumberdaya kelautan dan perikanan bagi masyarakat. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat. Secara sosial budaya masyarakat dipengaruhi oleh rendahnya kualitas kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, perumahan, maupun lingkungan.

Budaya bahari bangsa Indonesia yang merupakan warisan nenek moyang, telah mengalami pergeseran. Kejayaan Majapahit dan Sriwijaya tidak diwarisi oleh generasi saat ini. Budaya konsumtif dan tidak produktif sangat menonjol di berbagai kehidupan nelayan dan pembudidaya. Hal ini tidak terlepas dari kondisi budaya umum bangsa Indonesia yang juga konsumtif dan menghabiskan uang pada musim panen dan berhutang pada musim paceklik. Namun demikian masih ada budaya positif yang dapat dijadikan kekuatan antara lain, kekompakan didorong oleh rasa senasib, ulet dalam bekerja karena terbiasa menghadapi gelombang di laut serta kesederhanaan. (h) **Pertahanan dan Keamanan.** Permasalahan utama yang sangat mengganggu pengelolaan sumberdaya ikan sampai saat ini adalah masih tingginya kegiatan *Illegal fishing* merupakan faktor penting penyebab rendahnya kinerja perikanan tangkap dan merupakan ancaman bagi kegiatan konservasi kawasan perairan yang dijalankan. Kerugian negara akibat kegiatan ini diperkirakan sebesar Rp 30 triliun per tahun, dengan estimasi 25% ikan di perairan Indonesia ditangkap secara illegal (perkiraan FAO, 2003) dari total potensi 6,4 juta ton berarti = 1,6 juta ton.

Penanganan Illegal fishing belum optimal, hal ini ditandai dari masih banyaknya kapal asing melakukan penangkapan tanpa izin, melanggar ketentuan izin dan pemalsuan dokumen. Pelanggaran oleh kapal Indonesia juga terjadi cukup intensif, antara lain dokumen tidak lengkap, menyalahi *fishing ground*, penggunaan bahan beracun dan lain-lain.

Gangguan *Illegal fishing* terhadap kawasan konservasi perairan disebabkan sampai saat ini kawasan konservasi belum terpetakan dalam peta pelayaran internasional, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sangat merugikan kawasan konservasi dan belum dapat dilakukan tindakan tegas menyangkut lemahnya perangkat aturan terkait posisi geografi kawasan konservasi. Dengan kondisi negara yang serba terbatas, terutama kekuatan laut untuk pengawasan dan operasi di laut, diperlukan sinergi antar aparat penegak hukum di laut dan kerjasama dengan pengelola kawasan konservasi. Sinergi dalam suatu kekuatan dan pengorganisasian sampai saat ini belum optimal pelaksanaannya, Fungsi pengadilan perikanan juga harus ditegakkan disertai upaya penyadaran diharapkan mampu mengikat pertahanan dan keamanan diwilayah laut, sehingga fungsi konservasi untuk pertahanan dan keamanan negara dapat dioptimalkan.

Implikasi Implementasi Wawasan Nusantara dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan terhadap Kesadaran Politik Masyarakat Pesisir dan Kesadaran Politik Masyarakat Pesisir terhadap Ketahanan Nasional. Kawasan konservasi perairan dalam pandangan wawasan nusantara harus mampu diimplementasikan sebagai penggerak ekonomi, kesejahteraan sosial masyarakat serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat pesisir. Kawasan konservasi mampu mengokohkan status hukum kewilayahan utamanya bagi wilayah pulau-pulau kecil terluar yang rentan dari ancaman disintegrasi dan penguasaan negara lain. Implementasi wawasan nusantara dan peningkatan pendidikan politik masyarakat pesisir menjadi bagian yang tidak dapat ditinggalkan dalam mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif. Berbagai peran penting kawasan konservasi belum disadari sepenuhnya dalam pemahaman masyarakat Indonesia, sehingga upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan secara Berkelanjutan dapat terus ditingkatkan melalui implementasi Wawasan Nusantara untuk selanjutnya berdampak pada kesadaran politik masyarakat pesisir yang pada akhirnya mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh. **(a) Implikasi Implementasi Wawasan Nusantara dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan terhadap Kesadaran Politik Masyarakat Pesisir.** Implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan yang masih belum optimal sebagai implikasi kurang harmonisnya kebijakan, kurangnya kesadaran dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat berimplikasi terhadap kurangnya kesadaran politik masyarakat pesisir:

- 1) Masih lemahnya kebijakan nasional yang mendukung pembangunan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau

- kecil, dan belum optimalnya implementasi peraturan perundangan dibidang konservasi kawasan perairan
- 2) Belum optimalnya kelembagaan kelautan dan perikanan, serta kordinasi antar sektor yang belum optimal menyebabkan ketidakpastian pengambilan keputusan politik dalam pengelolaan sumberdaya dan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - 3) Masih rendahnya kesadaran dan kapasitas politik masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di bidang konservasi perairan yang berkelanjutan
 - 4) Belum efektifnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pengelola.
 - 5) Belum optimalnya kerjasama pengelolaan kawasan konservasi perairan.
 - 6) Masih Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan kawasan konservasi perairan
 - 7) Belum optimalnya peran dan fungsi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - 8) Adanya ancaman degradasi ekosistem akibat eksploitasi sumberdaya dan pengaruh perubahan iklim global.
 - 9) Menurunnya fungsi ekologis, sosial budaya dan ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
 - 10) Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran politik ditingkat legislatif dan penentu kebijakan yang menyebabkan tumpang tindih kebijakan konservasi perairan ditingkat pusat dan daerah.
 - 11) Kurang efektifnya pelaksanaan pembangunan yang diakibatkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat di dalamnya, ditambah lagi pemanfaatan hasil laut dan perikanan belum terdistribusi secara adil dan merata.
 - 12) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk mendukung sektor perikanan, pariwisata dan ekonomi masyarakat lokal masih belum optimal dilaksanakan.

(b) Implikasi Kesadaran Politik Masyarakat Pesisir terhadap Ketahanan Nasional. Belum optimalnya Implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan berimplikasi pada kurangnya kesadaran politik masyarakat pesisir, secara simultan berimplikasi pada ketahanan nasional, antara lain:

- 1) Lemahnya kemampuan untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat pesisir dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, menyebabkan mudahnya masuk pengaruh luar yang berisi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang melemahkan ketahanan nasional.
- 2) Belum tumbuhnya kesadaran politik dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, jati diri bangsa, dan kesamaan perasaan sebagai bangsa.

- 3) Tidak terlaksananya pendidikan politik yang mempengaruhi identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam tujuan nasionalnya
- 4) Kurangnya sinergitas pendidikan politik dan tumpang tindih pemanfaatan sumber kekayaan alam, khususnya konservasi perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rawan konflik dapat menimbulkan potensi permasalahan yang mengganggu ketahanan nasional.

PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN

Dari uraian penjelasan diatas berdasarkan pendekatan Ipoleksosbudhankam maka permasalahan utama implementasi wawasan nusantara dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat dikelompokkan dalam empat faktor utama sebagai berikut:

- a. Kebijakan pembangunan belum sepenuhnya berorientasi kelautan sebagai pemersatu kepulauan.
- b. Rendahnya pemahaman wawasan nusantara
- c. Belum optimalnya pengelolaan wilayah perairan laut secara berkelanjutan.
- d. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan

Permasalahan-permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri namun saling terkait satu dengan lainnya sehingga pemecahan masalahnya membutuhkan keterpaduan dan pendekatan multidimensi.

PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Suatu bangsa yang telah bernegara, dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Pengaruh itu timbul dari hubungan timbal balik antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi serta cita-cita dan kondisi sosial masyarakat, budaya, tradisi, keadaan alam, wilayah serta pengalaman sejarahnya. Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya, termasuk untuk mengelola konservasi kawasan perairan. Pengelolaan kawasan konservasi perairan mampu mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan produksi perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, upaya ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat pesisir khususnya, umumnya keutuhan wilayah serta jati diri bangsa.

Pengaruh Perkembangan Lingkungan Global. Perkembangan lingkungan global yang berpengaruh terhadap implementasi wawasan nusantara pada pengelolaan kawasan konservasi kawasan perairan antara lain sebagai berikut :

- a. **Global Warming.** Akhir-akhir ini pembicaraan mengenai pemanasan global (*global warming*) yang mengakibatkan perubahan iklim (*climate change*) kian ramai dibicarakan dan menjadi pusat perhatian dunia. Terlebih setelah adanya pertemuan akbar yang

disebut *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali. Pada intinya agenda utama UNFCCC adalah mempersiapkan bumi kita ini agar dapat mengurangi pemanasan global dan mengatasi dampaknya⁷. Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan cukup luas di dunia, sangat memainkan peran penting untuk bisa menjaga paru-paru dunia. Namun sesungguhnya Indonesia yang 2/3 wilayahnya adalah lautan, juga memiliki fungsi dan peran cukup besar dalam mengikat emisi karbon, bahkan dua kali lipat dari kapasitas hutan. Hal yang paling nyata dari pemanasan global adalah dampaknya terhadap laut, yakni **kenaikan permukaan air laut** yang dapat menyebabkan pemucatan/pemutihan terumbu karang (*bleaching*). selanjutnya memiliki dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kepedulian terhadap *Global Warming* merupakan Implementasi Wawasan Nusantara dengan tindakan mawas ke dalam melalui pengelolaan konservasi kawasan perairan, dan mawas ke luar dengan melakukan kerjasama yang disepakati bersama dalam berbagai konvensi internasional.

- b. **Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference - WOC*)**. Pada Bulan Mei 2009, Indonesia menjadi tuan rumah *event* besar yaitu *World Ocean Conference* (WOC), Konferensi Kelautan Dunia. Dalam *event* ini, para ahli kelautan mempresentasikan berbagai kegiatan penelitian dan pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut. Selain itu, *event* ini juga sebagai ajang diskusi, komunikasi, dan *sharing* pengalaman ahli-ahli kelautan dunia. Bersamaan dengan WOC 2009, Indonesia juga menekankan kembali komitmennya untuk mengembangkan KKP menjadi 20 juta Ha pada tahun 2020. Komitmen tersebut didukung oleh negara-negara tetangga dalam wilayah *Coral Triangle* yaitu: Malaysia, Philippines, Solomon, Papua New Guinea, dan Timor Leste, serta komitmen dukungan dana dari Amerika Serikat dan Australia. Komitmen tersebut juga ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan yang dapat mendukung pengembangan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, berdasarkan *National Plan of Action* (NPOA) dan *Regional Plan of Action* (RPOA), yang disusun sejalan dengan program pengelolaan konservasi Kawasan Perairan berorientasi pada implementasi wawasan nusantara, khususnya konsep negara kepulauan.⁸
- c. **Rio de Janeiro (KTT Rio+20)**. Konferensi Tingkat Tinggi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan dikenal sebagai Rio+20. Dewasa ini lautan menjadi pusat perhatian dari negara-negara bangsa (*nation states*) dan perusahaan transnasional untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Eksploitasi lautan oleh berbagai pihak telah menimbulkan berbagai masalah kontemporer seperti masalah politik, hukum, ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Pemerintah Indonesia di Forum Rio+20

⁷ Risalah Pelaksanaan UNFCCC - Kementerian Lingkungan Hidup, 2007.

⁸ <http://beritasore.com/2009/03/02/woc-pertegas-posisi-tawar-negara-maritim-indonesia>, diunduh tgl 15 Juli 2012

menyampaikan usulan tentang prinsip '*Blue Economy*' guna mendorong kesadaran global terhadap pengelolaan laut dan sumber daya pesisir. Ekonomi Biru dinilai memiliki potensi dalam paradigma pembangunan baru dengan menerapkan model pengembangan bisnis baru yang mensinergikan antara pertumbuhan, pembangunan dan lingkungan. Hal ini sangat mendukung pengelolaan konservasi kawasan perairan yang berorientasi pada konsep negara kepulauan dan konsep tanah air dari implementasi wawasan nusantara.

Pengaruh Perkembangan Lingkungan Regional. Perkembangan lingkungan regional yang berpengaruh terhadap implementasi wawasan nusantara pada pengelolaan kawasan konservasi perairan antara lain sebagai berikut :

a. Coral Triangle Initiative (CTI). *Coral triangle* adalah sebuah kawasan di Asia-Pacific yang dalam dua dekade belakangan ini menjadi pusat penelitian para ahli kelautan dunia. *Coral Triangle* yang mencakup 6 negara meliputi Indonesia, Philipina, Malaysia, Timor leste, Papua New Guinea and Kepulauan Salomon dengan luas total terumbu karang 75.000 Km², merupakan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, khususnya terumbu karang. Indonesia sendiri memiliki luas terumbu karang sekitar 51.000 Km² yang menyumbang lebih dari 21% luas terumbu karang dunia. Melihat peran dan posisinya yang strategis, maka Presiden Republik Indonesia pada pertemuan APEC di Sydney tahun 2007, telah mempelopori sebuah inisiatif perlindungan terumbu karang yang disebut *Coral Triangle Initiative* (CTI). Keenam negara yang tergabung dalam CTI disebut sebagai CT6. Inisiatif ini juga telah mendapatkan dukungan dan respon yang positif dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia. CTI ini merupakan gambaran adanya kepemimpinan yang memberdayakan wawasan nusantara dalam mengambil keputusan. Dengan demikian arah pengelolaan konservasi kawasan perairan semakin jelas dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat pesisir sekaligus dapat dijadikan instrumen bagi pencapaian ketahanan nasional jika pelaksanaannya berorientasi pada Wawasan Nusantara. Selain CTI ada pula bentuk kejasama regional seperti *Sulu Sulawesi Marine Ecoregion* (SSME) dan *Bismarck Solomon Sea Ecoregoin* (BSSE).

b. Kawasan Perbatasan Negara. Wilayah perairan Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga. Negara-negara yang memiliki kawasan perbatasan maritim dengan Indonesia, antara lain: Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Niugini, Australia, Palau dan Timor Leste. Bentangan kawasan perbatasan yang ada sangat luas dengan tipologi yang bervariasi yakni dari pedalaman sampai pulau-pulau kecil terluar. Ketidakjelasan batas maritim ini sering menimbulkan pertentangan antara aparat yang bertugas di lapangan dan nelayan Indonesia dan negara-negara tetangga. Permasalahan tersebut jika dihadapi dengan diplomasi saja, kenyataannya belum dapat terselesaikan

dengan cepat. Melalui Pengelolaan konservasi kawasan perairan yang berorientasi pada Implementasi Wawasan Nusantara, maka secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap proses penyelesaian batas wilayah laut dengan negara tetangga.

Pengaruh Perkembangan Lingkungan Nasional. Perkembangan lingkungan nasional yang berpengaruh terhadap implementasi wawasan nusantara pada pengelolaan konservasi kawasan perairan baik untuk mengembangkan kesadaran politik masyarakat pesisir maupun menciptakan ketahanan nasional yang handal ditinjau dari seluruh aspek Astagatra, antara lain sebagai berikut :

- a. **Geografi.** Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km² yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,1 juta km² dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km². Selain itu, terdapat 17.504 pulau di Indonesia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan cakupan yang demikian besar dan luas, tentu saja maritim Indonesia mengandung keanekaragaman alam laut yang potensial, baik hayati dan nonhayati. Namun demikian wilayah perairan Indonesia rawan terhadap bencana gempa bumi dan gelombang tsunami sehingga Indonesia masih perlu belajar dari keberhasilan negara lain dalam mengelola kawasan konservasi perairan.
- b. **Demografi.** Jika dilihat dari segi sosial, sebagian besar penduduk Indonesia (kurang lebih 75%) hidup di wilayah pesisir (pertumbuhan rata-rata 1,49% per tahun)⁹. Hal ini disebabkan secara administratif, sebagian besar daerah kabupaten/kota yang ada terdapat 1.129 kecamatan secara topografi terletak di wilayah pesisir dan dari 64.472 desa yang ada sekitar 5.479 desa merupakan desa pesisir¹⁰. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, meskipun Indonesia memiliki laut dan pantai yang luas, namun taraf hidup dan kesejahteraan sebagian besar para nelayan pada umumnya masih sangat memprihatinkan dan jauh dari yang diharapkan. Ironisnya penduduk Indonesia yang berorientasi ke laut dan memiliki *geographical awerenes* sangat minim.
- c. **Sumber Kekayaan Alam.** Potensi maritim Indonesia yang dapat diperbaharui dipandang dari segi Perikanan meliputi; Perikanan Laut (Tuna/Cakalang, Udang, Demersal, Pelagis Kecil, dan lainnya). Potensi tersebut belum termasuk hutan mangrove, terumbu karang serta energi terbarukan serta jasa seperti transportasi, pariwisata bahari yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Richardson (2008) menyatakan bahwa sekitar 70 persen produksi minyak dan gas bumi berasal dari kawasan pesisir dan lautan. Dari 60 cekungan yang potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 di pesisir, dan hanya enam di daratan. Sedangkan Potensi kekayaan tambang dasar laut seperti aluminium, mangan, tembaga, zirconium, nikel, kobalt, biji besi non

⁹ BPS, 2011

¹⁰ Faisal Eriza, *Implementasi Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut*.

titanium, vanadium, dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum teridentifikasi dengan baik sehingga diperlukan teknologi yang maju untuk mengembangkan potensi tersebut.¹¹

- d. Ideologi.** Falsafah dan ideologi Pancasila merupakan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, yang apabila dihadapkan pada tantangan untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memelihara kesejahteraan dan keamanan yang adil dan merata di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia, menuntut diwujudkannya seluruh Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, baik dalam aspek kewilayahan maupun dalam aspek dinamisasi system pemerintahan dan kemasyarakatan. Lahirnya sebuah konsepsi geopolitik yang khas di Indonesia, karena lahir dari falsafah dan ideologi Pancasila serta kondisi, posisi dan potensi wilayah Indonesia yang spesifik berwujud kepulauan dan terletak di jalan silang dunia yang sangat vital. Dengan demikian, pembangunan yang lebih berorientasi ke daratan jelas tidak sejalan dengan konsep negara kebangsaan (Pancasila) dalam Wawasan Nusantara.
- e. Politik.** Dewasa ini lautan menjadi pusat perhatian dari negara-negara bangsa (*nation states*) dan perusahaan trans-nasional untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan kebanggaan. Hubungan geografi dengan politik sangatlah erat sehingga muncul adanya definisi geopolitik yang merupakan konsep penguasaan ruang hidup. Konsepsi geopolitik bagi Indonesia menjadi aktual bila dihubungkan dengan kesadaran akan posisi geografis wilayah Indonesia, kepentingan atas integritas nasional dalam kondisi geografi yang terpecah-belah, pengambilan peran dalam kawasan regional, danantisipasi ancaman kekuatan asing. Saat ini bangsa Indonesia lebih berorientasi pada penguasaan wilayah daratan, itupun sudah menimbulkan berbagai keragaman sistem penguasaan. Tata kelola pemerintahan dengan menerapkan sistem desentralisasi di dalam satu wadah sistem politik demokrasi lebih relevan daripada sistem sentralisasi (otonomi daerah) untuk kondisi ke-Indonesia-an. Oleh sebab itu melalui pengelolaan konservasi kawasan perairan ini diharapkan sistem desentralisasi dapat memanfaatkan seluruh ruang hidup sesuai geografi Indonesia.
- f. Ekonomi.** Pada tahun 2008 saja tercatat PDB pada subsektor perikanan mencapai angka Rp136,43 triliun. Nilai ini memberikan kontribusi terhadap PDB kelompok pertanian menjadi sekitar 19,13 persen atau kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 2,75 persen. Hingga triwulan ke III 2009 PDB perikanan mencapai Rp128,8 triliun atau memberikan kontribusi 3,36 persen terhadap PDB tanpa migas dan 3,12 persen terhadap PDB nasional. Kusumastanto (2009) menyebutkan bahwa Potensi maritim Indonesia yang dapat diperbaharui dipandang dari segi Perikanan meliputi; Perikanan

¹¹ <http://indomaritimeinstitute.org/?p=584>, Indonesia Raksasa Maritim: Masih Tertidur Lelap, 2011, diunduh tgl 15 Juli 2012

Laut (Tuna/Cakalang, Udang, Demersal, Pelagis Kecil, dan lainnya) sekitar 4.948.824 ton/tahun, dengan taksiran nilai US\$ 15.105.011.400, *Mariculture* (rumput laut, ikan, dan kerang-kerangan serta Mutiara sebanyak 528.403 ton/tahun, dengan taksiran nilai US\$ 567.080.000, Perairan Umum 356.020 ton/tahun, dengan taksiran nilai US\$ 1.068.060.000, Budidaya Tambak 1.000.000 ton/tahun, dengan taksiran nilai US\$ 10.000.000.000, Budidaya Air Tawar 1.039,100 ton/tahun, dengan taksiran nilai US\$ 5.195.500.000, dan Potensi Bioteknologi Kelautan tiap tahun sebesar US\$ 40.000.000.000, secara total potensi Sumberdaya Perikanan Indonesia senilai US\$ 71.935.651.400 dan yang baru sempat digali sekitar US\$ 17.620.302.800 atau 24,5 persen.¹² Belum potensi lainnya. Potensi ekonomi kelautan yang sangat besar itu, belum dapat kita transformasikan menjadi sumber kemajuan dan kemakmuran bangsa. Itu karena kita belum adanya keseriusan dalam mendayagunakan sumber daya kelautan.

- g. Sosial Budaya.** Saat ini kualitas kehidupan manusia Indonesia masih rendah, maka masih minimnya SDM yang dapat dikategorikan sebagai pelaku pembangunan yang disebut masyarakat madani. Oleh sebab itu Sumberdaya Manusia Indonesia sebagian besar masih menjadi obyek pembangunan. Padahal pembangunan menekankan pada manusia yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreatif dan inovatif, disiplin dan profesional, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan lingkungan dan kemampuan manajemen, termasuk untuk mengembangkan potensi kealutan. Pengelolaan konservasi kawasan perairan mutlak dilakukan melalui penerapan konsep kebangsaan dari wawasan nusantara dengan memberdayakan masyarakat lokal (pesisir) secara optimal diharapkan kesadaran politik masyarakat pesisir terbangun.
- h. Pertahanan Keamanan.** Tidak adanya pengaturan zona penangkapan antara nelayan kecil tradisional dengan pengusaha pukat dan *trawl* yang dilengkapi dengan peralatan modern tidak hanya merugikan nelayan kecil tetapi juga telah menimbulkan bentrokan berdarah dan sejumlah korban jiwa. Belum lagi maraknya *illegal fishing* serta pelanggaran kedaulatan di wilayah laut oleh pihak asing. Laut merupakan lapisan atau benteng terluar pertahanan kita belum terkelola dengan benar. Hal yang patut dicermati adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang saat ini terbelit konflik sosial berkepanjangan umumnya adalah daerah yang berada dijalur pelayaran internasional, seperti, Bali, Lombok, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, Aceh, Papua dan lain-lain. Kemudian yang lebih menonjol lagi adalah pada wilayah yang memiliki sumber kekayaan alam yang bernilai tinggi. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan belum

¹² Ibid, Catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

mampu merefleksikan kondisi geografisnya itu secara tepat dan seimbang dalam komposisi kekuatan pertahanannya.

PELUANG DAN KENDALA

a. Peluang. Berdasarkan perkembangan lingkungan global, regional dan nasional maka peluang yang teridentifikasi berpengaruh terhadap implementasi wawasan nusantara pada pengelolaan konservasi kawasan perairan antara lain sebagai berikut :

- 1) Terbentuknya UNFCCC sebagai bentuk kepedulian dan kewaspadaan masyarakat dunia terhadap dampak pemanasan global merupakan peluang bagi Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia untuk membuka cara pandang bangsa Indonesia tentang ciri dan lingkungannya dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi secara bertanggungjawab, integratif serta dijiwai Pancasila untuk mendorong kebersamaan dalam kehidupan nasional yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana hakekat Wawasan Nusantara.
- 2) WOC telah membangkitkan Indonesia dalam mengembangkan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana komitmen tersebut didukung oleh negara-negara tetangga, terlebih dengan telah adanya penyusunan *National Plan of Action* (NPoA) dan *Regional Plan of Action* (RPoA). Target tersebut relevan dengan sistem pengelolaan konservasi kawasan perairan sepanjang implementasi wawasan nasional berlandaskan geopolitik yang berpijak pada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, dasar negara dan ideologi nasional.
- 3) Wacana *Blue Economy* yang diangkat pada Rio + 20 juga memiliki orientasi yang sejalan dengan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola konservasi kawasan perairan dimana keduanya akan memiliki nilai tambah bagi ketahanan nasional sepanjang memberdayakan seluruh komponen pembangunan yang memiliki wawasan kebangsaan.
- 4) Suatu langkah yang tepat dan strategis jika Indonesia berinisiatif untuk menyuarakan sekaligus memimpin *Coral Triangle Initiative* (CTI), mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas dan keanekaragaman terumbu karang tertinggi di dunia. Dengan memimpin CTI, Indonesia mendapatkan peran dan posisi penting dalam upaya perlindungan terumbu karang dunia. Sekaligus melindungi aset bangsa yang sangat berharga.
- 5) Sebagai landasan visional, wawasan nusantara dapat dibuktikan memberi arahan bagi pencapaian tujuan nasional melalui pembangunan nasionalnya. Wawasan nusantara mengajarkan bagaimana perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah, satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Jika hal ini diterapkan pada pengelolaan konservasi kawasan perairan maka kesadaran politik masyarakat pesisir

yang selama ini dinilai termarginalkan akan terbangun sehingga kemampuan bangsa dan negara dalam mempergunakan aspek alamiah (trigatra) sebagai dasar penyelesaian kehidupan nasional dalam segala bidang yang ada dalam pancagatra terakumulasi menjadi hubungan keseluruhan kehidupan nasional (astagrata) yang disebut Ketahanan nasional.

- 6) Indonesia memiliki sumber daya pesisir dan lautan sangat beragam baik jenis maupun potensinya dan merupakan daya dukung lingkungan bagi terjaminnya stok ikan. Potensi sumber daya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun, masih memiliki potensi untuk dinikmati jangka panjang jika dikelola dengan baik.
- 7) Peluang pengembangan usaha perikanan Indonesia memiliki prospek yang baik. Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah lingkup tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi diperkirakan sebesar US\$ 82 miliar per tahun. Pengelolaan kawasan konservasi yang efektif mampu meningkatkan perikanan tangkap yang berpotensi memulihkan ekonomi lebih cepat.
- 8) Pasar ekspor produk perikanan baik segar maupun olahan masih sangat menjanjikan. Hal ini didukung oleh meningkatnya permintaan ikan dunia sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk dunia, terjadinya pergeseran preferensi makan masyarakat dunia beralih ke ikan, akibat dari berbagai penyakit pada ternak seperti flu burung, anthrax dan sapi gila. Demikian pula dengan pasar regional di Asia seperti RRC, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan sangat menjanjikan dengan meningkatnya permintaan. Tata cara penangkapan ikan ramah lingkungan dan keseimbangan pengelolaan ekosistem mampu meningkatkan nilai produk perikanan.
- 9) Liberalisasi perdagangan global dibawah pengaturan *World Trade Organization* (WTO) memberikan peluang kepada Indonesia untuk bersaing secara fair dengan negara lain, serta terlindunginya pasar produk ikan Indonesia di luar negeri dari persaingan tidak sehat seperti dumping.
- 10) Semakin berkembangnya industri farmasi, kosmetika dan makanan serta minuman yang sebagian besar bahan produksinya berasal dari biota perairan, terutama dari sumber daya ikan seperti terumbu karang, merupakan peluang pengembangan industri masa depan yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi yang dapat dikembangkan dari kawasan konservasi perairan yang terkelola dengan baik.
- 11) Potensi wisata bahari yang memanfaatkan sumber kekayaan alam perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan panorama yang eksotis disertai pemandangan bawah laut yang luar biasa. Potensi terumbu karang bernilai strategis diperkirakan mampu

menghasilkan pendapatan pariwisata setara dengan 25.000 USD per kilo meter persegi.

- 12) Potensi perdagangan karbon dari mangrove dan juga asosiasi terumbu karang berperanserta dalam upaya dunia untuk mengatasi perubahan iklim. Kepeloporan Indonesia dalam Konservasi Kawasan perairan memberikan peluang positif dalam pendanaan lingkungan dimasa depan

b. Kendala. Berdasarkan perkembangan lingkungan global, regional dan nasional maka beberapa hal yang menjadi kendala terhadap implementasi wawasan nusantara pada pengelolaan konservasi kawasan perairan antara lain sebagai berikut :

- 1) Kuatnya pengaruh dari luar dihadapkan pada bentuk negara kepulauan Indonesia serta dengan perbedaan kadar keeratn ikatan ke dalam pada setiap kebudayaan masyarakat, mengakibatkan pengaruh dari luar itu tidak tersebar secara merata sehingga tercipta perbedaan yang cukup signifikan antara masyarakat yang telah mampu berpikir modern, terbuka dan adaptatif terhadap setiap perubahan nilai, dan masyarakat yang masih ketat mempertahankan tradisi kebudayaan aslinya. Hal ini akan menjadi kendala bagi sosialisasi nilai-nilai kehidupan baru yang membawa perubahan bagi kemajuan bangsa seperti nilai-nilai keberlanjutan pembangunan, pemberdayaan masyarakat secara optimal dan kesadaran sebagai warga negara sebagai pengejawantahan dari prinsip dan konsep Wawasan Nusantara yang berlaku pada lingkup nasional, regional dan global seperti dalam menyikapi *global warming*.
- 2) Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami dampak *global warming* seperti kenaikan permukaan air laut menjadi tantangan bagi pengelolaan konservasi kawasan perairan. Kenaikan permukaan air laut dapat secara langsung mengakibatkan hilangnya pulau-pulau kecil yang tidak saja berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan ekosistem juga terhadap geopolitik Indonesia, mengingat pulau terluar merupakan pijakan penting dalam menentukan batas wilayah dengan negara lain.
- 3) Ekosistem pesisir dan laut sangat rentan terhadap pemanasan global, pada akhirnya akan berdampak pada kelompok masyarakat rentan. Nelayan dan kaum miskin di wilayah pesisir akan menjadi korbannya. Hingga saat ini nelayan sudah semakin sulit menentukan kapan sebaiknya melaut karena "musim" ikan semakin sulit diprediksi. Disatu sisi pembangunan konservasi kawasan perairan ini dituntut untuk dapat memberdayakan masyarakat pesisir sebagai subyek pembangunan, disisi lain masyarakat sendiri itu sendiri keberadaannya lebih signifikan sebagai obyek pembangunan.
- 4) Kesadaran pelaku perikanan akan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan masih rendah. Rusaknya terumbu karang oleh kegiatan penangkapan ikan dengan racun, cara penangkapan yang melanggar ketentuan alat tangkap serta kerusakan pantai

- serta mangrove, merupakan indikasi kuat rendahnya kesadaran pelaku.
- 5) Kemampuan penegakan hukum di laut masih lemah, hal ini dapat dilihat dari masih tingginya illegal fishing, jumlah kekuatan unsur penegak hukum masih jauh dari kebutuhan, belum terkoordinasikannya pelaksanaan penegakan hukum di laut (masih berkerja sektoral).
 - 6) Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk tujuan pemanfaatan budidaya, perikanan tangkap ramah lingkungan, pariwisata bahari, serta pendidikan dan penelitian.
 - 7) Lemahnya dukungan faktor-faktor penting yang kewenangannya di luar Kewenangan pengelolaan kawasan konservasi laut, masih terdapat dua kementerian (Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan), sehingga pengelolaan konservasi kawasan termasuk jenis ikan masih mengalami beberapa inkonsistensi kebijakan di tingkat lapangan.
 - 8) Masih minimnya pedoman pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, disertai kelembagaan pengelola di daerah yang masih lemah. Mengakibatkan pengelolaan kawasan konservasi masih terbatas pada perencanaan dan belum diimplementasikan secara baik di dalam praktek pengelolaan.

KONDISI IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA TERHADAP PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN YANG DIHARAPKAN, KONTRIBUSI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Implementasi Wawasan Nusantara diharapkan dapat tetap menjaga satu kesatuan Ipoleksosbudhankam untuk mencapai tujuan nasional. Upaya ini diikuti dengan sinergi kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya pesisir dan laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Langkah implementasi ini diharapkan memperkuat sistem perpolitikan, utamanya dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat yang mampu meningkatkan partisipasi politik guna mendukung ketahanan nasional bangsa. Peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pemahaman pemahaman terhadap pelestarian lingkungan, mampu menumbuhkan sikap dan perilaku yang lebih bijak dalam pengelolaan sumberdaya laut secara lestari, sehingga selanjutnya dapat meningkatkan fungsi, kualitas, dan keanekaragaman hayati. Untuk itu, perlu revitaliasasi pembangunan yang berorientasi ke lautan guna mensejahterakan masyarakat pesisir.

Kondisi Implementasi Wawasan Nusantara terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang Diharapkan. Luas kawasan konservasi yang telah dicapai telah memenuhi target dari rencana pembangunan jangka menengah nasional 2010-2014, namun langkah-langkah pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan yang merupakan target utama perlu terus ditingkatkan. Pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan yang “efektif” adalah harapan yang senantiasa terus digapai perwujudannya, hingga pada akhirnya tercapai kesejahteraan

masyarakat sebagai keuntungan dari pengelolaan kawasan konservasi yang lestari.

Target pengelolaan efektif kawasan konservasi yang ditetapkan pada tahun 2011 seluas 2.542.300 hektar dan telah tercapai, yaitu pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Laut Sawu - NTT, Gili Matra - NTB, Laut Banda - Maluku, Pulau Pieh - Sumbar, Padaido - Papua, Kapoposang - Sulsel, Aru Tenggara - Maluku, Raja Ampat dan Waigeo di Papua Barat. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Raja Ampat – Papua barat, Sukabumi - Jabar, Berau - Kaltim, Pesisir Selatan - Sumbar dan Bone Bolango - Gorontalo. Target ini akan terus dilanjutkan, sesuai dengan RPJMN, yakni seluas 4,5 juta hektar secara kumulatif hingga tahun 2014.

TABEL 3. LUAS PENGELOLAAN EFEKTIF KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BERDASARKAN RPJMN TAHUN 2010-2014

No	Tahun	Luas (ha)	Luas Kumulatif (Ha)	Uraian Kegiatan
1	2010	900.000,00	900.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Zonasi dan Rencana Pengelolaan • Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan • Infrastruktur Pendukung Pengelolaan Kawasan • Koordinasi dan Pengawasan Sumberdaya Ikan • Rehabilitasi Ekosistem Kawasan dan Populasi Ikan • Pilot Project Perlindungan dan Pelestarian Kawasan • Pilot Pemafaatan Wisata Bahari dan Perikanan • Penguatan Partisipasi dan Ekonomi Masyarakat • Kerjasama dan Jejaring Pengelolaan kawasan
2	2011	1.642.353,00	2.542.353,00	
3	2012	682.769,00	3.225.122,00	
4	2013	422.395,17	3.647.517,17	
5	2014	1.153.965,01	4.801.482,18	
	Total	4.801.482,18	4.801.482,18	

Sumber: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2010

Capaian pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) dan peta jalan menuju target tahun 2014 sebagaimana disajikan pada TABEL 4.

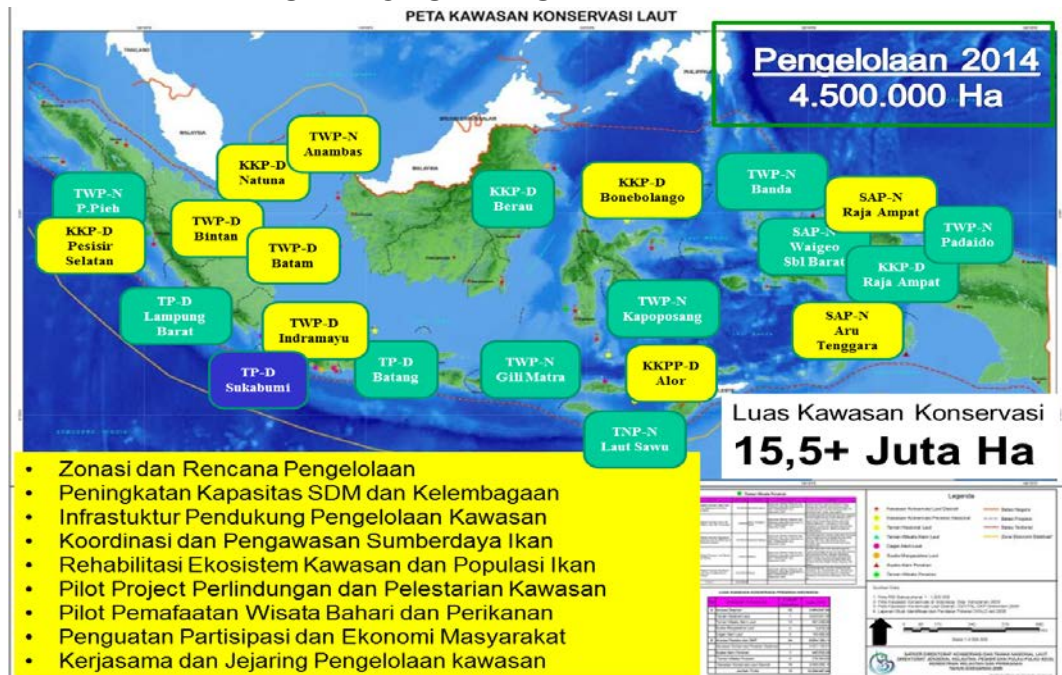
TABEL 4. CAPAIAN DAN ROADMAP KONSERVASI KAWASAN

CAPAIAN & ROADMAP KONSERVASI KAWASAN				
TARGET KONSERVASI KAWASAN				
2010	2011	2012	2013	2014
Pengelolaan 900.000 Ha	• Pengelolaan 2,5 juta Ha • Penambahan seluas 700.000 Ha	• Pengelolaan 3,2 juta Ha • Penambahan seluas 500.000 Ha (akumulasi 1,2 juta Ha)	• Pengelolaan 3,6 juta Ha • Penambahan seluas 500.000 Ha (akumulatif)	• Pengelolaan 4,5 juta Ha • Penambahan seluas 300.000 Ha (akumulasi 2 juta Ha)
ROADMAP KONSERVASI KAWASAN				
2010	2011	2012	2013	2014
Pengelolaan 900.000 Ha TNP Laut Sawu	• Pengelolaan 2,5 juta Ha 2010 + TNP Laut Sawu, Gili Matra, Laut Banda, Raja Ampat, Sukabumi, Berau, Pessel, Bone Bolango, Pieh, Padaido, Kapoposang, Aru Tenggara, SAP Rja Ampat, Waigeo • Penambahan seluas 700.000 Ha TWP Anambas	• Pengelolaan 3,2 juta Ha 2010 + 2011 + Batam, Bintan, Natuna • Penambahan seluas 500.000 Ha (akumulasi 1,2 juta Ha) Kab. Nunukan, Belitung Timur, P.Jiew Maluku Utara, Tanggamus, Sultra Jember & Trenggalek	• Pengelolaan 3,6 juta Ha 2010 + 2011 + 2012 + Batang, Lampung Barat, Alor, Indramayu • Penambahan seluas 500.000 Ha (akumulasi 1,7 juta Ha) Kab. Toli-toli Sulteng, Maluku Tenggara Barat & Sulbar, P.Widi Halsei MALUT	• Pengelolaan 4,5 juta Ha 2010 + 2011 + 2012 + 2013 + TNP Laut Sawu • Penambahan seluas 300.000 Ha (akumulasi 2 juta Ha) Kab. Nunukan (P Gosong makassar)

Sumber: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2011

Sebaran target pengelolaan efektif yang akan dicapai pada tahun 2014 secara terperinci sebagaimana ilustrasi pada GAMBAR 1. berikut ini:

GAMBAR 1. SEBARAN LOKASI TARGET PENGELOLAAN EFEKTIF KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN



Sumber: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2010

Peningkatan upaya pengelolaan efektif kawasan konservasi juga dibarengi dengan identifikasi dan inventarisasi potensi calon kawasan konservasi, diutamakan pada wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang rawan disintegrasikan. Pengembangan kawasan konservasi ini untuk menjawab target 20 Juta hektar Kawasan konservasi pada tahun 2020. Optimalisasi pengembangan kawasan konservasi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar diharapkan mampu memperkuat integrasi yang mengokohkan wawasan nusantara, mengeliminasi terjadinya pelanggaran hukum, *illegal fishing* maupun eksploitasi sumberdaya yang berlebih yang mengancam degradasi sumberdaya lingkungan. Pengelolaan efektif kawasan konservasi dilakukan terhadap tiga aspek yang menjadi indikator utama dalam pengelolaan kawasan konservasi, yakni perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Penguatan status hukum kawasan di tingkat internasional dengan cara mendaftarkan pada Peta Pelayaran Internasional, mampu mencegah pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan zonasinya dan secara konsisten dapat mengatasi segala ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan yang mengancam kedaulatan wilayah laut Indonesia.

Paradigma baru pengelolaan KKP dibawah Menteri Kelautan dan Perikanan tidak hanya berbicara tentang perlindungan dan pelestarian, tetapi menekankan pentingnya pemanfaatan kawasan konservasi demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan yang dapat dilakukan di dalam KKP meliputi pemanfaatan untuk perikanan tangkap dan budidaya, pemanfaatan wisata, pemanfaatan penelitian dan pengembangan, serta kegiatan ekonomi lainnya yang menunjang konservasi. Namun demikian pemanfaatan yang dilakukan dalam KKP ini bersifat terbatas dan harus mengutamakan kepentingan kelestarian sumberdaya, sehingga harus memperhatikan daya dukung kawasan. Secara prinsip maupun praktek di

lapangan, dampak kawasan konservasi telah jelas dalam peningkatan hasil tangkapan masyarakat lokal. Hasil pengukuran efektivitas melalui E-KKP3K dapat menjadi indikator peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, bersumber dari hasil tangkapan ikan di wilayah tangkap nelayan yang merupakan limpahan manfaat kawasan konservasi perairan. Dampak ini nyata dalam mendorong peningkatan pendapatan langsung masyarakat dan menggerakkan sektor ekonomi pendukung di wilayah pesisir. Demikian pula penilaian dampak pengelolaan wisata bahari terhadap fungsi lingkungan kawasan konservasi perairan diperlukan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan efektif kawasan konservasi. Manfaat langsung pariwisata bahari dapat menjadi sumber pendanaan jasa lingkungan bagi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Peluang ini sangat nyata dan berpotensi menjadi penggerak ekonomi yang cukup efektif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Operasionalisasi pengelolaan efektif KKP melalui berbagai upaya pemanfaatan yang mendorong penguatan ekonomi masyarakat pesisir dapat meningkatkan pemahaman cara pandang yang berkontribusi kepada peningkatan kesadaran masyarakat pesisir yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan nasional. Upaya ini menjadi bagian penting dalam proses integrasi nasional yang mempersatukan bangsa maritim kepulauan.

Kondisi implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan yang diharapkan guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat pesisir dan ketahanan nasional ditinjau dari aspek astagatra, antara lain sebagai berikut:

a. Geografi. Pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta perairannya untuk tujuan konservasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir. Pemanfaatan geografis secara optimal bagi perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang diharapkan antara lain:

- 1) Pengelolaan 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dapat dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi bagi usaha perikanan (tangkap dan budidaya), sehingga tidak ada lagi WPP yang *overfishing* maupun WPP yang *underfishing*.
- 2) Wilayah bioekoregion dilakukan secara optimal dan seimbang pemanfaatannya, dikembangkan sebagai kawasan konservasi untuk menjamin ketangguhan kawasan konservasi yang ada di Indonesia
- 3) Optimalisasi pemanfaatan wilayah geografi kawasan konservasi perairan untuk kegiatan budidaya perikanan dan penangkapan ikan ramah lingkungan.
- 4) Peningkatan fungsi geografi wilayah pemanfaatan umum sesuai penataan ruang/zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk kegiatan perikanan budidaya dan penangkapan ikan sesuai kapasitas dan potensinya serta peningkatan ekonomi masyarakat secara merata.

b. Demografi. Implementasi Wawasan Nusantara terhadap Pengelolaan Kawasan konservasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

dan kualitas sumberdaya manusia masyarakat pesisir dilihat dari tingkat pendapatan, pendidikan kesehatan maupun profesionalismenya. Kondisi yang diharapkan adalah:

- 1) Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif dapat mendorong perekonomian yang mampu menyerap tenaga kerja di bidang penangkapan ikan, budidaya, pariwisata bahari.
- 2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat pesisir melalui terciptanya pemanfaatan lingkungan yang seimbang dan berwawasan lingkungan
- 3) Tersedianya tenaga profesional di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan, pariwisata bahari maupun pengawasan dan penegakan hukum
- 4) Tercapainya peningkatan ekonomi masyarakat pesisir di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pariwisata bahari berbasis pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- 5) Meningkatnya pemahaman konservasi di kalangan pengusaha maupun masyarakat yang berdampak pada kesadaran dan partisipasi politik, sehingga tercapai keseimbangan kualitas Sumberdaya manusia

c. Sumber Kekayaan Alam. Pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan dan optimalisasinya untuk kawasan konservasi perairan diharapkan dapat memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam baik yang berasal dari perairan laut, perairan umum dan berdampak dalam menopang ekonomi masyarakat pesisir serta menunjang pembangunan nasional yang berwawasan nusantara. Kondisi pemanfaatan SKA untuk perikanan yang diharapkan adalah:

- 1) Wilayah perairan laut seluas 5,8 juta Km² meliputi perairan teritorial dan ZEEI dimanfaatkan secara optimal sampai pada tingkat produksi yang sesuai dengan tingkat JTB (jumlah tangkapan yang diperbolehkan) secara merata di sebelas WPP menggunakan prinsip-prinsip konservasi untuk perikanan berkelanjutan.
- 2) Pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan yang secara tidak langsung menggunakan sumber kekayaan alam, yaitu melalui pemanfaatan wisata bahari untruk meningkatkan nilai sumberdaya dan jasa lingkungan.
- 3) Pemanfaatan ekosistem mangrove dan terumbu karang di kawasan konservasi yang terjaga dengan baik, berpeluang untuk perdagangan karbon dan mengatasi dampak perubahan iklim.
- 4) Mengoptimalkan keseimbangan pemanfaatan sumber kekayaan alam untuk kegiatan penangkapan ikan secara tradisional dan budidaya laut bernilai ekonomis tinggi di kawasan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.
- 5) Peningkatan identifikasi dan eksplorasi potensi kelautan, terutama di laut dalam guna mencari sumber energi maupun sumberdaya ikan potensial, serta melakukan konservasi biota laut migrasi.
- 6) Menata keseimbangan pemanfaatan sumber kekayaan alam di sepanjang nusantara baik di dalam kawasan konservasi maupun eksploitasi sumber kekayaan alam di luar kawasan konservasi dengan prinsip kelestarian sumberdaya.

d. Ideologi. Pengelolaan kawasan konservasi perairan secara efektif dapat diakselerasi dan dioptimalisasikan sehingga mampu memperkokoh ideologi bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Demikian pula proses pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan pembangunan.

Pancasila sebagai *way of life* bangsa Indonesia ditransformasikan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan dalam bentuk nilai-nilai praksis dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Pengelolaan kawasan konservasi diharapkan mampu menjaga keseimbangan pemanfaatan sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan kawasan konservasi dalam pandangan wawasan nusantara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam nilai praksis adalah pemanfaatan sumberdaya secara optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Tuhan YME memberikan kekayaan alam di wilayah Indonesia sebagai karunia yang harus disyukuri dengan menjaga lingkungan agar potensi perikanan dapat dinikmati sampai generasi anak cucu. Hal ini penting karena sumber daya perikanan bersifat *renewable* (dapat memperbaharui diri), namun *carrying capacity* (kapasitas daya dukung atau pemulihan) terbatas.
- 2) Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi dalam pembangunan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selalu berpegang teguh pada Kemanusiaan yang adil dan beradab, bentuknya adalah perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi serta pembangunan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat atau secara *bottom up* berdasarkan kondisi riil di lapangan, serta menjadikan nelayan dan pembudidaya bukan hanya sebagai obyek namun juga subyek yang berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka pembangunan nasional.
- 3) Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi dalam pembangunan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan untuk memberikan kontribusi bagi utuhnya NKRI dan terwujudnya Persatuan Indonesia yang berwawasan nusantara. Kondisi yang diharapkan adalah pemanfaatan sumber daya ikan di kawasan konservasi yang tersebar di wilayah perairan R.I. dapat mempererat persatuan dan kesatuan antar kelompok masyarakat atau antar daerah. Konservasi sebagai penyeimbang pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat menghilangkan konflik-konflik yang selama ini terjadi akibat perebutan daerah tangkapan, gerusan lokasi budidaya laut oleh industri besar maupun konflik pemanfaatan sumberdaya laut lainnya. Minimnya konflik mampu mendorong harmonisasi pemanfaatan di wilayah laut menuju persatuan NKRI.
- 4) Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi dalam pembangunan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diharapkan

dapat dilaksanakan berdasarkan kepentingan rakyat dengan mengakomodasikan aspirasi masyarakat pesisir, nelayan dan pembudidaya, dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang mampu dikomunikasikan kepada wakil-wakil masyarakat pesisir, nelayan dan pembudidaya yang tergabung dalam asosiasi dan organisasi non Pemerintah. Jika kondisi tersebut dapat dilaksanakan, berarti sesuai dengan sila ke empat Pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan Perwakilan.

- 5) Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi dalam pembangunan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Oleh karenanya kondisi yang diharapkan adalah manfaat kawasan konservasi perairan terhadap hasil-hasil pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan sosial berarti pembangunan nasional berbasis kelautan dan perikanan dapat memberikan manfaat sosial, terutama kesejahteraan baik moril maupun materiil.
- e. Politik.** Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi dalam pembangunan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai pandangan wawasan nusantara ditinjau dari perspektif politik baik luar maupun dalam negeri, diharapkan adanya dukungan politik yang kuat agar pengelolaan kawasan konservasi dapat dilaksanakan secara efektif sehingga mampu memperkuat pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
- 1) Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi dalam pembangunan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mampu meningkatkan peran Indonesia secara global dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim. selain itu, pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dijalankan mampu meningkatkan posisi tawar nilai sumberdaya ikan dalam percaturan perikanan dunia dan regional semakin menonjol dan Indonesia dapat menjadi anggota bagian utama dalam penentuan kebijakan perikanan dunia dan regional yang berwawasan lingkungan.
 - 2) Konsep pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menerapkan prinsip konservasi merupakan kepentingan dunia internasional, secara politis mempunyai nilai tawar yang cukup tinggi, yang diharapkan meningkatkan komitmen dunia internasional untuk memberikan bantuan teknis dan operasional dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
 - 3) Peraturan perundang-undangan, kebijakan dan pedoman teknis yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi serta kebijakan nasional yang lebih berpihak kepada sektor kelautan dan perikanan diharapkan mendapat dukungan politik dari supra struktur politik, terutama untuk mengatasi berbagai kepentingan konservasi perairan yang saat ini masih terdapat mandat ganda, yakni berdasarkan UU nomor 5 tahun 1990, UU nomor 41 Tahun 1999

dengan UU nomor 31 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 27 tahun 2007 serta UU nomor 32 tahun 2004, dalam hal kewenangan pengelolaan kawasan konservasi. Harmonisasi berbagai peraturan menuju sinergi yang mendorong optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi perairan diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu dekat dan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat melaksanakan peraturan perundangan tersebut sesuai kewenangannya.

- 4) Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi dalam pembangunan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diharapkan mendapat dukungan politik dari supra struktur politik, terutama DPR dalam penentuan APBN, APBD maupun dukungan kebijakan yang mampu mendorong pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan kawasan konservasi lebih efektif. Demikian pula diharapkan komitmen dari kementerian sektor yang berkaitan dengan pembangunan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mendukung suksesnya pembangunan ekonomi masyarakat pesisir seperti masalah kesyahbandaran, pariwisata bahari, ekonomi kreatif, pendidikan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijaksanaan fiskal dan keringanan pajak, subsidi BBM, masalah perdagangan, ketenaga kerjaan dan penegakan hukum.
 - 5) Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi dalam pembangunan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara politis menentukan partisipasi politik dan orientasi pilihan warga masyarakat pesisir terhadap pemimpin di daerah, maupun orientasi masyarakat secara umum dalam pemilihan pemimpin nasional. Issue konservasi sering menjadi ganjalan dalam proses pemilihan umum karena pemahaman politik calon pemimpin terhadap konservasi yang masih sangat minim.
- f. **Ekonomi.** Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi dalam pembangunan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional terutama dilihat dari peningkatan nilai manfaat sumber kekayaan alam, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan. kondisi yang diharapkan adalah:
- 1) Nilai pemanfaatan sumberdaya meningkat dan memberikan kontribusi bagi perekonomian lokal masyarakat pesisir maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Misalnya, nilai ekonomi terumbu karang yang dimanfaatkan dalam pengelolaan kawasan konservasi yang optimal dapat mencapai 15.000 USD sampai dengan 45.000 USD per kilometer persegi per tahun.
 - 2) Kontribusi sektor perikanan kepada PDB meningkat secara konsisten setiap tahun.
 - 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pekerjaan alternatif di kawasan konservasi, mampu menumbuhkan ekonomi lokal secara konsisten meningkat. Setidaknya, pendapatan dari ekonomi alternatif tersebut mampu menggandakan pendapatan rumah tangga nelayan masyarakat pesisir.

- 4) Pendapatan daerah dan pendapatan sektor yang menjadi dampak pengelolaan kawasan konservasi perairan meningkat secara signifikan, seperti perusahaan penginapan, jasa operator wisata, biro perjalanan, retribusi jasa lingkungan, maupun berbagai atraksi yang selain meningkatkan pendapatan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
- 5) Tenaga kerja sektor perikanan diharapkan meningkat, yang meliputi kegiatan di hulu sampai di hilir. Hal ini sejalan dengan optimalisasi pemanfaatan konservasi berbasis industrialisasi perikanan yang akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
- 6) Investasi baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) meningkat tajam, sebagai hasil dari terciptanya iklim investasi yang kondusif.
- 7) Pengelolaan kawasan konservasi yang optimal menjadi penggerak ekonomi sektor informal.

g. Sosial Budaya. Implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan kawasan konservasi diharapkan mampu menciptakan kondisi sosial budaya masyarakat pesisir yang lebih baik dari kondisi saat ini. Kondisi yang diharapkan adalah:

- 1) Konflik sosial antar masyarakat, terutama konflik horisontal dan konflik antar daerah sebagai akibat perebutan daerah penangkapan dapat dihilangkan dan terwujud suasana kondusif.
- 2) Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat pesisir sebagai dampak tumbuhnya perekonomian dan pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan.
- 3) Semakin kecilnya kesenjangan sosial diantara pelaku usaha dan antara *stake holders* perikanan terutama nelayan dan pembudidaya ikan, serta kesenjangan sosial antar daerah. Sebaliknya terjadi pemerataan pendapatan serta keadilan kesempatan berusaha.
- 4) Tingkat kesejahteraan masyarakat lokal sebagai pelaku perikanan terutama nelayan dan pembudidaya makin meningkat, ditandai dengan kenaikan pendapatan rumah tangga penduduk yang meningkat setiap tahun secara konsisten mejadi dua kali lipat dari kondisi sebelumnya.
- 5) Kesadaran masyarakat akan pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari makin meningkat, yang ditunjukkan oleh makin kecilnya tingkat perusakan lingkungan dan penggunaan bahan beracun dan peledak.
- 6) Jumlah masyarakat miskin makin berkurang, ditunjukkan dengan meningkatnya jangkauan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah meningkat dan merata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 7) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil
- 8) Terpeliharanya budaya lokal masyarakat pesisir yang telah diakomodasi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan secara efektif dan berkelanjutan.
- 9) Kesadaran masyarakat untuk gemar makan ikan makin meningkat, untuk memperbaiki mutu gizi dan kecerdasan, diwujudkan dengan

meningkatnya konsumsi ikan masyarakat secara konsisten setiap tahun

- 10) Budaya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, baik nelayan maupun pembudidaya ikan semakin meningkat, kesadaran dalam pengelolaan lingkungan meningkat, sehingga pola konsumtif berubah menjadi produktif dan efisien.
- 11) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat pesisir yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendidikan dan partisipasi politik masyarakat.

h. Pertahanan dan Keamanan. Implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan kawasan konservasi dilihat dari perspektif Hankam harus dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Hankamneg, terutama partisipasi masyarakat dalam sistem hankam serta sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan sebagai komponen pendukung. Kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Sumberdaya manusia pendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan yang telah terlatih dalam pengawasan perikanan berbasis masyarakat dapat menjadi pendukung kepolisian dan TNI dalam pengelolaan keamanan di wilayah laut, secara simultan dapat mendukung sistem pertahanan dan keamanan nasional.
- 2) Pos jaga, pusat informasi, kantor pengelola kawasan konservasi perairan, maupun prasarana pelabuhan perikanan, dirancang untuk mampu mendukung kepentingan operasi laut bila diperlukan pada masa krisis atau perang. Oleh karenanya, khususnya dalam pemilihan posisi pelabuhan yang dapat menampung kapal-kapal besar (PPS), harus sesuai dengan posisi strategis untuk operasi laut. Untuk mampu menghadapi ancaman musuh maka pelabuhan PPS dijadikan pangkalan pertahanan yang menghadap samudera.
- 3) Pusat informasi kawasan konservasi yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau terluar, dalam kondisi perang dapat dijadikan pos *supply* logistik dari industri-industri perikanan pendukung dan pengolah hasil perikanan
- 4) Kapal-kapal perikanan dengan kapasitas 100 GT ke atas dapat dimanfaatkan sebagai komponen pendukung Armada cadangan untuk angkut personel maupun persenjataan dan sekaligus berfungsi sebagai deteksi dini kapal-kapal musuh. Untuk keperluan tersebut diperlukan pelatihan kepada para Nakhoda kapal.
- 5) Masalah *illegal fishing* yang berdampak kepada kerugian negara dan terjadinya *overfishing*, diharapkan dapat diatasi secara bertahap, melalui garda terdepan kawasan konservasi di pulau-pulau terluar, diharapkan terwujud ketertiban dan keamanan di laut melalui koordinasi dan kerjasama harmonis diantara aparat penegak hukum di laut tercipta dengan baik.

Kontribusi Implementasi Wawasan Nusantara dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan terhadap Kesadaran Politik Masyarakat Pesisir dan Kesadaran Politik Masyarakat Pesisir terhadap Ketahanan Nasional. Implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan diharapkan dapat memberikan kontribusi

positif guna membangun kesadaran politik masyarakat pesisir khususnya, sehingga memiliki kapasitas untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan dan politik yang pada akhirnya dapat mendukung ketahanan nasional.

a. Kontribusi Implementasi Wawasan Nusantara dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan terhadap Kesadaran Politik Masyarakat Pesisir. Implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan secara optimal dapat berkontribusi dalam harmonisasi kebijakan, peningkatan kesadaran dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat pesisir:

- 1) Menguatnya kebijakan nasional yang mendukung pembangunan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan sinergitas implementasi peraturan perundangan dibidang konservasi kawasan perairan
- 2) Optimalnya kelembagaan kelautan dan perikanan, serta terjalannya koordinasi antar sektor yang mampu meningkatkan konsistensi pengambilan keputusan politik dalam pengelolaan sumberdaya dan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 3) Meningkatnya kesadaran dan kapasitas politik masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di bidang konservasi perairan yang berkelanjutan
- 4) Efektifnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pengelola.
- 5) Optimalnya kerjasama pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- 6) Menguatnya pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan kawasan konservasi perairan
- 7) Optimalnya peran dan fungsi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 8) Meningkatnya kualitas ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang melalui pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan dan berkontribusi dalam mengatasi dampak perubahan iklim global.
- 9) Meningkatnya fungsi ekologis, sosial budaya dan ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- 10) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran politik ditingkat legislatif dan penentu kebijakan sehingga tercipta harmonisasi kebijakan konservasi perairan ditingkat pusat dan daerah.
- 11) Efektifnya pelaksanaan pembangunan disertai peningkatan partisipasi masyarakat, ditunjang dengan optimalisasi pemanfaatan hasil laut dan perikanan terdistribusi secara adil dan merata.
- 12) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk mendukung sektor perikanan, pariwisata dan ekonomi masyarakat lokal secara optimal dilaksanakan.

b. Kontribusi Kesadaran Politik Masyarakat Pesisir terhadap Ketahanan Nasional. Upaya membangun kesadaran politik

masyarakat pesisir berkontribusi terhadap ketahanan nasional, antara lain:

- 1) Menguatnya kemampuan untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat pesisir dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, sehingga mampu menangkal segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan nasional.
- 2) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, jati diri bangsa, dan kesamaan perasaan sebagai bangsa, yang mampu menumbuhkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.
- 3) Terlaksananya pendidikan politik yang mempengaruhi identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional
- 4) Sinergitas pendidikan politik dan optimalisasinya yang disertai pemerataan pemanfaatan sumber kekayaan alam, khususnya konservasi perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam dalam rangka ketahanan nasional yang tangguh.

INDIKATOR KEBERHASILAN

Berdasarkan penjelasan kondisi implementasi wawasan nusantara dalam pengelolaan konservasi kawasan perairan yang diharapkan serta kontribusinya terhadap pembangunan kesadaran politik masyarakat pesisir maupun kontribusi kesadaran politik masyarakat pesisir terhadap ketahanan nasional, maka indikator keberhasilannya sebagai berikut :

- a. Terwujudnya keseimbangan kebijakan pembangunan yang berorientasi kelautan sebagai pemersatu kepulauan.
- b. Meningkatnya pemahaman wawasan nusantara.
- c. Optimalnya pengelolaan wilayah perairan laut secara berkelanjutan.
- d. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan

Indikator keberhasilan ini didukung dengan keberhasilan dalam mengurangi kendala serta mengoptimalkan peluang dengan memperhatikan pengaruh lingkungan strategis guna mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam wawasan nusantara, sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir guna mewujudkan ketahanan nasional.

KONSEPSI IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA TERHADAP PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GUNA MEMBANGUN KESADARAN POLITIK MASYARAKAT PESISIR DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

Konsepsi implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan pada dasarnya mengacu kepada kondisi pengelolaan kawasan konservasi perikanan saat ini dihadapkan kepada kondisi yang diharapkan dapat tercapai dengan berbagai indikator keberhasilan yang meliputi terwujudnya keseimbangan kebijakan pembangunan yang berorientasi kelautan sebagai pemersatu kepulauan, meningkatnya pemahaman dan implementasi wawasan nusantara,

optimalnya pengelolaan wilayah perairan laut secara berkelanjutan, serta meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Pengelolaan konservasi kawasan perairan yang mencerminkan implementasi Wawasan Nusantara adalah adanya satu kesatuan wilayah, satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan pertahanan keamanan dalam keterpaduan kebijakan nasional yang mensejahterakan masyarakat pesisir yang dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan kesadaran politik masyarakat pesisir yang mengarah pada tercapainya tujuan pembangunan nasional. Masyarakat pesisir merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia yang memiliki keterwakilan partisipasi dan aspirasi sangat menentukan dalam Tatahan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB). Dengan demikian Ketahanan Nasional yang handal akan terwujud karena kebijakan-kebijakan yang dibuat benar-benar hasil suara golongan mayoritas yang memiliki kesadaran politik, bukan atas dasar paksaan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, diperlukan adanya optimalisasi berupa kebijakan, strategi, dan upaya untuk memantapkan implementasi wawasan nusantara dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan secara efektif dan berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat pesisir dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. Kebijakan (*policy*) merupakan arah pemantapan implementasi wawasan nusantara dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dirumuskan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai. Strategi merupakan suatu cara untuk mencapai sasaran yang diinginkan, sedangkan upaya adalah langkah-langkah aksi sebagai penjabaran dari strategi.

Kebijakan. Berdasarkan pembahasan yang mengacu kepada peluang dan kendala sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu, kondisi yang diharapkan berdasarkan indikator keberhasilan yang dihadapkan kepada kondisi saat ini, maka kebijakan implementasi wawasan nusantara dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Tingkatkan Implementasi Wawasan Nusantara dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan”**.

Strategi. Strategi yang akan dilaksanakan sebagai langkah yang menggunakan daya, dana, sarana dan prasarana menjadi sebuah kekuatan dalam mensukseskan kebijakan implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan guna membangun kesadaran politik masyarakat pesisir dalam rangka ketahanan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Strategi 1. Mewujudkan sinergitas orientasi pembangunan kelautan untuk mencapai tujuan nasional

Sinergitas orientasi pembangunan kelautan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan *stakeholder* dan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui perumusan kebijakan/regulasi, koordinasi, komunikasi dan keterpaduan dalam menentukan sasaran prioritas dengan mempertimbangkan faktor

lingkungan, sosial ekonomi serta budaya setempat untuk mencapai tujuan nasional.

- b. Strategi 2.** Mewujudkan tingkat pemahaman Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan

Tercapainya peningkatan pemahaman Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional sebagai perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan terhadap masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pelatihan, sosialisasi, pembinaan dan edukasi tentang pengetahuan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

- c. Strategi 3.** Mewujudkan optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui konservasi secara berkelanjutan

Optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu berbasis konservasi secara berkelanjutan melalui koordinasi dan kerjasama peningkatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan pertahanan keamanan sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam rangka ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia

- d. Strategi 4.** Mewujudkan peningkatan pemahaman dan penatakelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif

Pengembangan kawasan konservasi perairan di pulau-pulau kecil terluar dan perbatasan secara berkelanjutan dengan melibatkan dan meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi dan meningkatkan penatakelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif di seluruh Kepulauan Indonesia melalui penerapan kebijakan dan keculasi, koordinasi, kerjasama, perencanaan pengelolaan dan manajemen zonasi yang baik, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan lembaga pengelola, pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung yang baik, maupun upaya-upaya pengelolaan kawasan yang dilakukan secara sinergis dan terpadu.

Upaya. Langkah-langkah riil atau tindakan nyata dan bersifat teknis yang memuat unsur siapa (subyek) melakukan apa (obyek), dengan cara bagaimana (metoda) sebagai penjabaran pernyataan strategi yang diharapkan dalam implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan guna membangun kesadaran politik masyarakat pesisir dalam rangka ketahanan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Upaya Strategi 1.** Langkah-langkah nyata dalam rangka mewujudkan sinergitas orientasi pembangunan kelautan untuk mencapai tujuan nasional dilaksanakan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1) DPR, Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Terkait berupaya merumuskan perencanaan pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu.

a) Pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil setidaknya telah masuk

dalam prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014), yaitu Prioritas 9: Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana dan Prioritas 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, Dan Pascakonflik. Dalam pelaksanaannya, diperlukan koordinasi perencanaan mengingat program prioritas ini berada di beberapa kementerian.

- b) Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan berupaya menyiapkan data dan informasi pendukung status pengelolaan kawasan konservasi perairan, yang dijadikan acuan dalam pembahasan perencanaan kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil menjadi Indikator kinerja utama Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - c) Bappenas berupaya mengkoordinasikan perencanaan kegiatan kementerian dan lembaga, termasuk konservasi kawasan perairan yang menjadi sub-sub bagian kegiatan pada prioritas lingkungan hidup dan penanganan bencana.
 - d) Perumusan perencanaan kegiatan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, misalnya Pengelolaan Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi NTT, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dan juga kepada 10 Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten yang merupakan lokasi kawasan konservasi. Kegiatan Pengelolaan efektif TNP Laut Sawu menjadi prioritas kegiatan yang dimonitor perkembangannya oleh Unit Kerja Presiden bidang Pemantauan Percepatan Pembangunan (UKP4).
 - e) Melakukan percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah implementasi pembangunan yang memprioritaskan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, diantaranya penyelesaian rancangan peraturan daerah tentang rencana strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang diikuti dengan penyusunan rencana zonasi dan penyusunan rencana aksi sebagai landasan pembangunan daerah dan konservasi secara terpadu.
- 2) DPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian terkait mendorong pengesahan undang-undang pengelolaan sumberdaya alam, dan undang-undang kelautan.
- a) Pengesahan undang-undang pengelolaan sumberdaya alam sampai saat ini masih menemui kendala, diperlukan sinkronisasi setidaknya terhadap 12 undang-undang dalam rangka merumuskan undang undang SDA yang mewadahi keterpaduan. Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir dan konservasi adalah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, mengkaji dan mensinergikan dengan UU no. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan UU no 31

- tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU no 45 tahun 2009.
- b) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, telah diatur melalui Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007, namun potensi kelautan yang teramat melimpah sejauh ini belum diatur khusus. Draft tentang rancangan undang-undang kelautan telah disusun, tetapi masih menemui kendala dalam pembahasannya. Dalam RUU Kelautan, salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah memasukkan aturan tentang pemanfaatan mineral laut dalam dan juga pemanfaatan laut dalam untuk dijadikan kawasan konservasi.
 - c) Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong dan berinisiatif melakukan pembahasan secara teknis terkait sumber kekayaan alam laut guna memperkuat substansi materi RUU Kelautan.
 - d) Kementerian Kelautan dan Perikanan secara aktif berupaya memberikan masukan substansi undang-undang sumberdaya alam, yang penyusunannya dikoordinasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
 - e) Mengoptimalkan implementasi Undang-undang nomor 27 tahun 2007 dalam rangka optimalisasi kebijakan yang berpihak kepada sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menyusun panduan pelaksanaannya.
 - f) Melakukan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dengan melibatkan para pemangku kepentingan guna menggalang kesamaan persepsi dalam implementasi kebijakan berbasis kelautan dan perikanan.
- 3) DPR, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri berupaya memprioritaskan alokasi anggaran kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
- a) Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengusulkan penambahan anggaran yang diperuntukkan bagi pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional serta untuk mendukung pelaksanaan kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan tahap satu. Tambahan anggaran untuk kebutuhan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun 2011 untuk diprogramkan kembali pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2012 sebesar Rp 2,1 triliun dan anggaran tambahan dari nota keuangan sebesar Rp 170 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program ketahanan pangan sebesar Rp1,63 triliun, program penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 286 miliar, program lingkungan hidup dan pengelolaan bencana sebesar Rp3,6 miliar serta program daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik sebesar Rp175 miliar¹³

¹³ http://kkp.go.id/index.php/arsip/c/7506/Kementerian-KP-Lakukan-Penghematan-Anggaran-Rp-2488-M/?category_id=34 diunduh pada tanggal 1 Agustus 2012

Untuk program ketahanan pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan kegiatan diantaranya, rehabilitasi saluran tambak tersier di Pantai Utara (Pantura) di Jawa, bantuan sarana dan prasarana produksi budidaya, modernisasi sarana perikanan tangkap serta pengembangan dan penataan infrastruktur di lima pelabuhan perikanan.

Sedangkan untuk program penanggulangan kemiskinan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan fokus dalam program pendidikan profesi bagi calon tenaga penyuluh kelautan dan perikanan bersertifikat sebanyak 4 (empat) ribu orang, pelatihan teknis dan kewirausahaan bersertifikat sebanyak 3 (tiga) ribu orang serta program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

Lebih lanjut, untuk program lingkungan hidup dan pengelolaan bencana akan menyelesaikan gedung *Coral Triangle Initiative* (CTI) center di Manado. Terkait program daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik, Kemen KP akan fokus dalam program bantuan berupa tambahan biaya operasional bagi kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyediaan sarana air bersih di pesisir di 20 kabupaten/kota serta pembangunan infrastruktur di pulau-pulau kecil.

Sebanyak 77,83 persen dari pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012 yang berjumlah Rp 5,87 triliun digunakan untuk mendukung pelaksanaan *triple track strategy plus one*. Nilai itu dipakai untuk melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan *pro poor* sebesar Rp 1,91 triliun, *pro growth* dan *pro job* sebesar Rp 2,11 triliun dan *pro environment* sebesar Rp 0,5 triliun. Sedangkan sebanyak 22,17 persen anggaran dialokasikan untuk kegiatan teknis pendukung dan operasional.

- b) Mengefektifkan pertemuan-pertemuan musyawarah pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah provinsi/kabupaten/kota yang memiliki wilayah perairan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk secara bersama mengkaji keseimbangan pengalokasian anggaran berbasis potensi sumberdaya dan pembangunan wilayah.
- c) Kementerian Kelautan dan Perikanan secara efektif melakukan konsultasi, pengawalan dan asistensi dalam pembahasan anggaran bidang kelautan dan perikanan.

b. Upaya Strategi 2. Langkah-langkah nyata dalam rangka mewujudkan tingkat pemahaman Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dilaksanakan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah dan Institusi terkait berupaya untuk meningkatkan pemahaman wawasan nusantara dalam pengelolaan kawasan konservasi

perairan terhadap masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- a) Melakukan sosialisasi Konsepsi Wawasan Nusantara, yang meliputi: (1) Kesadaran, Paham, dan Semangat Kebangsaan. Sosialisasi tentang kebangsaan dilakukan dalam lingkaran atau siklus: dimulai dari penumbuhan kesadaran, pengembangan pemahaman, mewujudkan semangat kebangsaan, kembali pada penumbuhan kesadaran berbangsa, dan seterusnya. (2) Cinta dan Pembelaan Tanah Air. (3) Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Warga Negara. Kesadaran ini dapat ditumbuhkan melalui pemahaman tentang struktur dan budaya bangsa Indonesia, kondisi geografi dan sumber kekayaan alam wilayah Indonesia, serta sistem pemerintahan negara Indonesia. (4) Kehidupan Multikultural dan Plural mengakui dan mengakomodasikan keberagaman etnis, ras, agama, suku, adat, bahasa, dan termasuk nilai-nilai yang berpotensi memecah-belah.
- b) Peningkatan pengelolaan geografi yang diupayakan melalui pemahaman, inventarisasi, koordinasi, pengelolaan (penetapan dan pemanfaatan) sehingga dapat memberikan keuntungan disemua bidang kehidupan, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan, meningkatkan ekonomi dan stabilitas nasional, selanjutnya mampu meningkatkan *bargaining position*. Pemanfaatan wilayah-wilayah perairan laut dan pulau-pulau kecil di perbatasan sebagai kawasan konservasi mampu meningkatkan pengelolaan geografi yang sekaligus meningkatkan ketahanan nasional.
- c) Peningkatan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara melalui pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan. Kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran nasionalisme kebangsaan, rasa kebersamaan dalam rangka memperkuat pemahaman wawasan nusantara sebagai satu kesatuan.
- d) Sosialisasi konsepsi Wawasan Nusantara, untuk mempercepat implementasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara langsung melalui ceramah, diskusi, dialog, tatap muka; dan tidak langsung melalui media elektronik dan media cetak. Sedangkan metode penyampaiannya berupa: Keteladanan (sikap, perilaku, tindakan, contoh kehidupan); Edukasi (formal dan informal); Komunikasi (langsung dan tidak langsung); Integrasi (terjalinya persatuan dan kesatuan). Pengertian serta pemahaman tentang Wawasan Nusantara akan membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang dan akan memantapkan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita serta tujuan nasional.

- e) Mengefektifkan kegiatan sosialisasi, komunikasi, bimbingan teknis dan aktualisasi pendidikan politik yang merupakan fondasi dasar (*basic fundamental*) guna menumbuhkan kembali pemahaman konsepsi wawasan nusantara yang mulai memudar dan mengoptimalkan implementasi wawasan nusantara oleh pemimpin nasional dalam pengelolaan wilayah geografi Indonesia berbasis lautan yang ditaburi pulau-pulau. Langkah ini sekaligus dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, bangsa dan negara yang berkualitas, agar mampu bersaing dengan kondisi zaman yang terus berubah.
- 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI dan POLRI, Kementerian Perhubungan dan Institusi terkait berupaya melaksanakan pengamanan terpadu wilayah perairan dan pulau-pulau terluar.
- a) Mengaktifkan Bakorkamla dalam koordinasi pengamanan laut secara terpadu. masing-masing kementerian mengefektifkan pertemuan koordinasi untuk menentukan jadwal patroli beserta dengan pendanaanya. Hamonisasi ini tidak berhenti pada pelaksanaan pengawasannya saja, namun hingga koordinasi pelaporan dan penindakan penegakan hukum.
 - b) Dalam rangka koordinasi keamanan laut di wilayah NKRI, telah ditetapkan surat keputusan kepala pelaksana harian badan koordinasi keamanan laut republik indonesia Nomor SKEP-068/KALAHAR/BAKORKAMLA/XI/2010 tentang SASANTI BAKORKAMLA RI “RAKSAMAHIVA CAMUDRESU NUSANTARASYA”. Kalimat tersebut mempunyai makna “kami penjaga laut nusantara dalam wilayah NKRI”. Upaya ini menjadi dasar pengamanan laut yang dilakukan secara terpadu dan berwawasan keutuhan NKRI.
 - c) Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyediakan fasilitas kapal pengawasan disertai dengan sistem pemantauan, pengendalian dan pengawasan (*Monitoring, Control and Surveillance/MCS*) terpadu yang dilengkapi sistem pemantauan kapal (*vessel monitoring system/VMS*) dan juga ditopang dengan sistem pengawasan berbasis masyarakat pada tingkat lapangan, yang merupakan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS).
 - d) Pemerintah melalui kementerian terkait (Menkopolhukam, Kementerian Perhubungan, TNI AL, Kemendagri) membangun pilar-pilar yang lebih monumental di kawasan konservasi pada pulau-pulau perbatasan, misalnya rambu suar, menara suar, mercusuar, pos-pos pengamanan.
 - e) Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian dalam negeri serta Menkopolhukam melakukan sosialisasi terhadap keberadaan kawasan konservasi dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar serta penyadaran akan pentingnya menjaga keamanan wilayah laut, kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil terluar.
 - f) Menerapkan model pengawasan di wilayah rawan *illegal fishing*, wilayah perairan pulau terluar dan pada wilayah ZEE yang

berpotensi konflik, dilaksanakan secara terpadu antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI dan POLRI, Kementerian Perhubungan dan Institusi terkait.

- g) Menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan teknis operasional pengawasan secara terpadu Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI dan POLRI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan dan Institusi terkait.
 - h) Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI dan POLRI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan dan Institusi terkait besama-sama mengkoordinasikan penempatan personil pengawas yang terlatih, pada lokasi/wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar secara merata di wilayah nusantara.
- 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Terkait, Pemerintah Daerah dan Institusi terkait berupaya memperkuat rasa kebangsaan, pemahaman konservasi dan pendidikan politik masyarakat secara formal dan informal.
- a) Melaksanakan pendidikan dasar-dasar konservasi dan pengawasan sumberdaya laut, terutama diperbatasan juga perlu ditingkatkan. Upaya ini disertai sosialisasi kepada seluruh masyarakat sehingga timbul kesadaran akan jati dirinya, tumbuh dan berkembangnya rasa kebangsaan, tidak mementingkan kepentingan diri ataupun kelompok/golongan, sehingga tumbuh kuat dan mantapnya kerjasama pengelolaan antar satu kawasan konservasi dengan kawasan konservasi lainnya secara nasional, menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesadaran akan bela negara.
 - b) Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, asistensi dan pembinaan kepada masyarakat tentang manfaat konservasi untuk mendukung perikanan berkelanjutan. Penguatan pemahaman masyarakat bahwa lautan merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dan sebagai pemersatu kepulauan nusantara.
 - c) Meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa konservasi merupakan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumberdaya ikan secara seimbang. Hal ini menumbuhkan sikap dan kesadaran masyarakat bahwa konservasi bukan hanya perlindungan semata, namun dapat dimanfaatkan untuk menopang perekonomian masyarakat lokal secara berkelanjutan.
 - d) Upaya peningkatkan pemahaman implementasi wawasan nusantara dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya komunikasi yang intensif, kegiatan-kegiatan penjangkauan (*outreach*), sosialisasi, pendidikan, dan pengembangan regulasi dan kebijakan yang mendukung. Alat untuk mencapai target-target tersebut meliputi strategi dan metode komunikasi, termasuk di dalamnya adalah bahan cetakan, video, situs/portal di internet, media (Televisi, radio, surat kabar), pameran-pameran, acara-acara khusus, dan

juga ritual serta festival tradisional. Peningkatan pemahaman masyarakat cenderung diikuti dengan meningkatnya partisipasi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Langkah selanjutnya diperlukan kerjasama yang erat dalam mengelola kawasan konservasi perairan tersebut melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan dan masyarakat.

- e) Peningkatan infrastruktur dikawasan konservasi, utamanya pada wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, meliputi penyiapan tata ruang wilayah, sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi. Sarana dan prasarana yang perlu dipersiapkan seperti pembuatan pelabuhan perikanan untuk masyarakat lokal, sarana jalan, sarana pendidikan, kesehatan, sarana listrik, sarana telekomunikasi, sarana air bersih, pelindung pantai dan sebagainya.

c. Upaya Strategi 3. Langkah-langkah nyata dalam rangka mewujudkan optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui konservasi secara berkelanjutan dilaksanakan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) DPR, Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kementerian terkait berupaya merumuskan kebijakan pemanfaatan perairan dan pulau-pulau terluar sebagai kawasan konservasi.
 - a) Undang-undang nomor 27 tahun 2007, Pasal 24 menyatakan bahwa pulau kecil, gosong, atol, dan gugusan karang yang ditetapkan sebagai pangkal pengukuran perairan Indonesia ditetapkan oleh Menteri sebagai kawasan yang dilindungi. Pengaturan lebih lanjut tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor Per.20/Men/2008. Khusus untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar yang ditujukan untuk menjaga Kedaulatan NKRI (amanat pasal 27), telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar, yakni secara tegas pada pasal 8 dinyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar untuk pelestarian lingkungan dilaksanakan dengan penetapan PPKT sebagai kawasan yang dilindungi dan dapat ditetapkan sebagian atau seluruhnya sebagai kawasan konservasi sebagian atau seluruhnya untuk konservasi.
 - b) Pengaturan tentang Konservasi Sumberdaya Ikan diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009. Pengaturan lebih lanjut tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 serta diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

Pengaturan lainnya mengenai Kemitraan, jejaring kawasan konservasi maupun pemanfaatan kawasan konservasi perairan sedang disusun secara intensif oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

- c) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagai mandat dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007, telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2008. Tindaklanjut implementasi kebijakan peraturan ini, sedang disusun pedoman teknis pelaksanaan evaluasi efektivitas kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K), yang juga merupakan implementasi dari peraturan mengenai Konservasi Sumberdaya Ikan (UU 31/2004 Jo UU 45/2009).
 - d) Penetapan kawasan konservasi di pulau terluar tidak hanya menyatukan daratan, tetapi menegaskan pula batas teritorial laut kedaulatan Indonesia. Sampai saat ini, upaya yang telah dilakukan adalah Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional di wilayah perbatasan dan pulau terluar telah dilakukan di Provinsi NTT (Taman Nasional Perairan Laut Sawu) dan di Kepulauan Riau (Taman Wisata Perairan Kep. Anambas), serta melaksanakan kegiatan identifikasi calon kawasan konservasi di beberapa Provinsi yang memiliki pulau-pulau terluar, diantaranya Maluku Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Maluku Tenggara Barat, Lampung, dan Sulawesi Tengah.
 - e) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi berupa pengawasan, monitoring sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan dan atau pulau terluar mampu mencegah konflik horisontal sekaligus membentengi ancaman pencurian di wilayah perairan laut serta mencegah disintegrasi bangsa.
 - f) Kementerian Pertahanan, dalam upaya pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan PP No. 62 tahun 2010 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan daya tampung lingkungan. kegiatan pertahanan dan keamanan di wilayah tersebut ditujukan antara lain: akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara di laut; penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain; penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara; penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau pengembangan potensi maritim lainnya.
- 2) DPR, Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kementerian terkait berupaya menggalang sumber-sumber pendanaan hibah luar negeri untuk pengelolaan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- a) Kebijakan pengelolaan dana hibah luar negeri telah dikeluarkan berdasarkan peraturan presiden nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Adanya peraturan presiden ini memberikan peluang pengelolaan dana-dana hibah luar negeri oleh pemerintah melalui lembaga wali amanat.
- b) Kementerian Keuangan mensosialisasikan dan melakukan asistensi terhadap kementerian terkait dalam hal mekanisme pengelolaan dana hibah luar negeri yang dimanfaatkan langsung oleh kementerian, lembaga swadaya masyarakat maupun institusi terkait untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- c) Koordinasi dan sinergitas melalui pembahasan intensif dengan kementerian lingkungan hidup sebagai *Focal Point* dari *Global Environment Facility* (GEF) dalam rangka mengoptimalkan penyusunan proposal dana *grant* maupun implementasinya untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- d) Mendorong kementerian luar negeri untuk menggalang kerjasama bilateral, regional dan multilateral guna membuka peluang akses pendanaan di bidang lingkungan hidup.
- e) Memanfaatkan peran strategis Indonesia sebagai inisiator kerjasama Regional *Coral Triangle Initiative* (CTI) untuk memperoleh pendanaan regional dan global untuk konservasi terumbu karang yang menyokong sumberdaya ikan untuk pangan dunia dan turut serta mengurangi dampak perubahan iklim.
- f) Memanfaatkan potensi geografi strategis Indonesia yang merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia, untuk dijadikan laboratorium alam konservasi dunia yang mampu mensejahterakan masyarakat.
- g) Dalam rangka mengurangi ancaman degradasi ekosistem akibat eksploitasi sumberdaya dan pengaruh perubahan iklim global, mempertahankan keanekaragaman hayati laut serta merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam implementasi konvensi keanekaragaman hayati (*Convention on Biological Diversity*), perjanjian internasional dan kerjasama regional maupun internasional, antara lain: *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), *Millenium Development Goals* (MDGs), *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), *Sulu-Sulawesi Seas Marine Ecoregion* (SSME), *Bismarck Solomon Seas Marine Ecoregion* (BSME), *Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia* (SDS-SEA), *Arafura and Timor Seas Experts Forum* (ATSEF), *Bali Plan of Action on Oceans and Coasts* (2006), dan *Coral Triangle Initiative* (CTI).
- h) Program nasional jangka panjang untuk rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang (COREMAP), didanai oleh pinjaman dan hibah dari ADB dan bank Dunia yang mencakup 8 Provinsi dan 15 kabupaten/kota. Saat ini, program COREMAP sedang dalam proses pengusulan untuk memasuki tahap institusionalisasi yang dipadukan dengan program CTI

(COREMAP-CTI). Program ini juga mendukung upaya pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan.

- i) Berbagai program konservasi dan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah diupayakan melalui pendanaan pinjaman dan hibah maupun asistensi teknis, diantaranya: marine protected area governance (MPAG) yang merupakan bantuan kemitraan dari USAID, program lainnya adalah IFAD, IMACS dan lainnya.
- 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi potensi dan mengoptimalkan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pertumbuhan ekonomi dan konservasi secara seimbang:
- a) Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan pedoman umum untuk pemanfaatan kawasan konservasi perairan, diantaranya untuk kegiatan pendidikan dan penelitian, kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan kegiatan pariwisata alam perairan. pedoman tersebut dapat memandu masyarakat, pengusaha maupun para pihak dalam perijinan dan pelaksanaan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan.
 - b) Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan asistensi penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah provinsi dan kabupaten/kota. RZWP3K ditetapkan dalam peraturan daerah, merupakan pembagian alokasi ruang dan struktur ruang, pola ruang yang dapat dijadikan acuan dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai potensinya.
 - c) Melakukan pemetaan secara detil potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta perairan disekitarnya di Indonesia, dan menetapkan lokasi-lokasi prioritas pengembangan sesuai karakteristik potensinya.
 - d) Menetapkan sentra-sentra industri dibidang kelautan dan perikanan yang memperoleh suplay hasil perikanan maupun budidaya laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang aksesibel sebagai penggerak ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - e) Optimalisasi kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) dari hasil perikanan, jasa kelautan dan jasa lingkungan.
 - f) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada bidang pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan, upaya konservasi kawasan perairan yang mendukung terciptanya pemanfaatan konservasi untuk jasa lingkungan sebagai penggerak ekonomi bangsa.
 - g) Melakukan asistensi penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi di kawasan konservasi, untuk menyediakan data potensi yang dikelola sesuai dengan peruntukan zona. Dokumen ini merupakan acuan pengelolaan yang dapat mengoptimalkan

- pemanfaatan kawasan konservasi sesuai tujuan pengelolaannya.
- h) Melakukan asistensi penyusunan rencana bisnis kawasan konservasi. Untuk mengoptimalkan potensi kawasan konservasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengundang investor untuk menjalin kerjasama pengelolaan kawasan konservasi guna meningkatkan perekonomian masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan.
 - i) Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan asistensi dan bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah/Dinas kelautan dan perikanan dalam prosedur pemberian ijin penangkapan, kegiatan budidaya dan pariwisata bahari yang wajib memperhatikan daya dukung lingkungan serta memperhatikan peraturan dikawasan sesuai dengan zonasi dan rencana pengelolaan.
 - j) Melakukan penilaian sumberdaya penting di kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta melakukan upaya budidaya jenis ikan, terumbu karang maupun sumberdaya alam penting yang bernilai ekonomi sesuai ketentuan peraturan-perundangan untuk kesejahteraan masyarakat di pesisir di sekitar kawasan konservasi.
- 4) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Terkait, Pemerintah Daerah dan Institusi Terkait berupaya memperkuat koordinasi dan sinergitas pembangunan diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- a) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk berbagai kepentingan ekonomi secara sinergis dan terpadu, dilaksanakan dengan koordinasi pusat dan daerah serta antar instansi secara horisontal. Pemanfaatan multi sektor di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diharmonisasikan dalam kerangka perencanaan dan pengelolaan secara terpadu.
 - b) Kementerian Kelautan dan Perikanan mengkoordinasikan pembentukan himpunan ahli pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
 - c) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pertemuan reguler untuk membahas rencana pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan melibatkan pemangku kepentingan
 - d) Menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan sinergitas antar instansi pemerintah dan masyarakat dengan melibatkan seluruh unsur sistem manajemen yang ada didalamnya, baik Negara, Bangsa, Pemerintah sebagai Manager maupun masyarakat sebagai penerima. Persoalan belum adanya keterpaduan kebijakan perlu dilakukan akselerasi dalam penyusunan kebijakan yang tidak hanya mengandalkan dari penentu kebijakan ditingkat atas saja (*top down*) melainkan perlu memperhatikan aspirasi masyarakat, selanjutnya masyarakat perlu didorong partisipasinya dalam perumusan perencanaan

kebijakan politik maupun dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

- e) Mengaktifkan Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (Komnas Kajiskan) dan Komisi Nasional Konservasi Laut (Komnaskolaut).
- f) Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan masukan dan asistensi teknis kepada bappeda dalam rangka mengefektifkan fungsi koordinasi perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah
- g) Mewujudkan keterpaduan perencanaan dan melakukan *gap analysis* untuk terobosan kebijakan yang memadukan *bottom up* dan *top down* proses antar kebijakan, antar sektor, antar tingkat pemerintah, antar daerah, antar pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan partisipasinya.
- h) Menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan yang terpadu melalui komunikasi, kerjasama dan partisipasi aktif antar pemangku kepentingan. Serta mewujudkan terobosan percepatan kebijakan dan implementasi sistem manajemen nasional yang pelaksanaannya secara terdesentralisasi namun secara nasional terkoordinasi melalui keterbukaan yang partisipatif.

d. Upaya Strategi 4. Langkah-langkah nyata dalam rangka Mewujudkan peningkatan pemahaman dan penatakelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif dilaksanakan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat berupaya melakukan pendampingan dan asistensi pengelolaan kawasan konservasi perairan.
 - a) Melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan pengelolaan kawasan konservasi perairan, meliputi: MPA-101, perikanan berkelanjutan, perencanaan konservasi, pemanfaatan wisata, selam dan monitoring terumbu karang, dan lain-lain.
 - b) Melakukan pendampingan daalam menangani isu pengelolaan kawasan konservasi maupun penyelesaian konflik pengelolaan terkait kawasan konservasi perairan.
 - c) Mendampingi dan memberikan asistensi teknis kepada pengelola kawasan konservasi dalam menyusun rencana pengelolaan beserta implementasinya, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - d) Melaksanakan kegiatan asistensi pengelolaan kawasan konservasi perairan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, Unit Pelaksana Teknis dan masyarakat dalam melaksanakan evaluasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (E-KKP3K) yang telah disusun dan tatacara implementasinya.
 - e) Melaksanakan percontohan pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat di kawasan konservasi, misalnya pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan wisata bahari.

Beberapa manfaat kegiatan ekowisata bagi kawasan konservasi perairan adalah: (1) adanya pemasukan (*income*) melalui tiket masuk dan biaya pemakaian sarana prasarana; biaya konsesi untuk sektor swasta seperti toko cenderamata, penyewaan perahu, warung makanan/restoran, dan tur; serta donasi dari pengunjung; (2) Adanya lapangan pekerjaan, misalnya staf kawasan lindung; usaha yang langsung melayani wisatawan; pemandu wisata/interpretasi alam; dan lapangan pekerjaan tak-langsung (sektor layanan lain, konstruksi, pemasok, dll.). (3) Media pendidikan lingkungan, melalui pemandu alam, pusat pengunjung, tanda atau marka di pantai. Hal ini secara langsung atau pun tidak langsung mendidik masyarakat dalam memelihara lingkungan, dan sebagai lokasi pembelajaran bagi pihak lain. (4) Justifikasi politis, misalnya pemerintah akan lebih mendukung kawasan konservasi perairan (KKP) bila sudah memberikan manfaat yang nyata – terutama pemasukan dan pekerjaan. Kawasan konservasi perairan juga dapat dijadikan alat promosi baik di level lokal, nasional, dan internasional terkait komitmen pada kegiatan pelestarian lingkungan secara nyata.

- f) Melaksanakan langkah-langkah sosialisasi, asistensi dan pembinaan kepada masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga fungsi konservasi dan ekonomi dapat dijalankan secara sinergis guna mendukung pembangunan nasional dalam rangka menciptakan ketahanan nasional yang tangguh.
- 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan metode evaluasi penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- a) Melakukan kajian ilmiah terhadap metode penilaian efektivitas kawasan konservasi yang telah dikembangkan oleh berbagai institusi maupun lembaga swadaya masyarakat, seperti World Bank, IUCN, WWF, TNC, WCS, dan lain-lain, yang selanjutnya disesuaikan dengan tata aturan perundang-undangan terkait tahapan pengelolaan kawasan konservasi perairan
 - b) Melaksanakan koordinasi penyusunan bersama mitra dan institusi terkait untuk memformulasikan metode evaluasi efektivitas yang sesuai dengan karakteristik kawasan konservasi dan indikator pengelolaan efektif
 - c) Melakukan uji coba penilaian efektivitas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (E-KKP3K) di kawasan konservasi yang menjadi target.
 - d) Memberlakukan E-KKP3K sebagai metode evaluasi resmi untuk menilai efektivitas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.
 - e) Melakukan sosialisasi E-KKP3K kepada pengelola kawasan konservasi dan masyarakat.
 - f) Memberlakukan E-KKP3K dan menerapkan mekanisme pemberian penghargaan terhadap pengelolaan kawasan konservasi yang dilaksanakan dengan baik dan efektif

berkelanjutan, serta penerapan sanksi terhadap kegagalan pengelolaan kawasan konservasi (apabila diperlukan).

- 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi perairan.
 - a) Melakukan asistensi dan pembinaan kelembagaan melalui penyelenggaraan pelatihan konservasi secara berjenjang sesuai kebutuhan pengelolaan efektif
 - b) Menjalankan program pendidikan lingkungan hidup (PLH) yang bertujuan untuk memberi informasi kepada pendukung dan menanamkan etika serta tata nilai konservasi sehingga anggota masyarakat dapat membuat keputusan tepat yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk konservasi.
 - c) Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan bekerjasama dengan Pusat Pelatihan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, mengembangkan kurikulum pelatihan konservasi dan melakukan standarisasi pelatihan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
 - d) Melakukan kerjasama dengan lembaga internasional (NOAA, USAID, dan lain-lain.) dalam pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan.
 - e) Memberikan bantuan infrastruktur pendukung penguatan kelembagaan, seperti pusat informasi, *poster* dan *leaflet*, pos jaga, alat komunikasi dan instrumen pengawasan.
- 4) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat berupaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penatakelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif.
 - a) Melakukan sosialisasi, asistensi dan pembinaan konservasi melalui penyelenggaraan pelatihan konservasi kepada masyarakat
 - b) Meningkatkan pemahaman konservasi dan mengharapkan dukungan partisipasi dari masyarakat lokal, kelompok-kelompok pemanfaat, dan lembaga pemerintahan. Partisipasi masyarakat tumbuh berdasarkan tingkat pemahamannya, sehingga rancangan program pendidikan dan peningkatan pemahaman perlu direncanakan secara mendalam.
 - c) Menjalani kerja sama dengan mitra-mitra dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan kawasan konservasi, seperti sekolah, kelompok nelayan, dan pemerintah lokal. Kawasan konservasi perairan dapat menjadi sarana yang merangsang kepedulian kepada lingkungan dan membangun kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya laut di wilayahnya.

- d) Menyusun materi muatan lokal untuk pendidikan konservasi yang diberikan untuk siswa/siswi tingkat sekolah dasar sampai menengah atas.
- e) Mendorong terciptanya kesadaran warga negara menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Ciri pengelolaan kawasan konservasi yang efektif biasanya diikuti dengan warga negara yang memiliki tingkat kesadaran tinggi terhadap konservasi.
- f) Melaksanakan program monitoring dan survei sosial terhadap masyarakat yang dapat mengukur perubahan tingkat kesadaran terhadap lingkungan dan perubahan perilaku yang terkait dengan isu kawasan konservasi sebagai umpan balik yang berharga dalam rangka menentukan strategi kampanye yang lebih efektif, dibanding dengan strategi yang lainnya.
- g) Melibatkan masyarakat dalam perencanaan partisipatif dalam menentukan lokasi kawasan konservasi, memetakan potensi, menentukan rencana zonasi dan menyusun rencana pengelolaan, menetapkan kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi dan pelaksanaan monitoring, pengawasan serta pelaporan kawasan konservasi. Dengan demikian, masyarakat secara optimal berpartisipasi mulai dari awal pembentukan hingga tercapainya pengelolaan efektif kawasan konservasi, yang memberikan dampak ekonomi bagi peningkatan kesejahteraannya.

REKOMENDASI

Kesimpulan. Implementasi Wawasan Nusantara dilakukan melalui sosialisasi Wawasan Nusantara yang didasari oleh konsep-konsep ideal dengan memperhatikan persoalan-persoalan nyata yang berkembang dalam lingkungan implementasinya, yakni dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan secara efektif dan berkelanjutan. Sosialisasi penanaman nilai-nilai dapat dilakukan dengan beberapa cara, baik formal, nonformal, maupun informal. Implementasi Wawasan Nusantara ke dalam perlu memperhatikan konsep bangsa, negara, dan wilayah, sedangkan ke luar perlu memperhatikan kepentingan negara-negara lain dalam penguasaan wilayah. Dalam implementasi Wawasan Nusantara diperlukan masyarakat madani yang bermoral, sadar hukum, dan beradab guna memperjuangkan kepentingan bersama kepada pemerintah. Sikap, pola dan cara pandang yang demikian mampu mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat pesisir dalam mengelola wilayah perairan nusantara sebagai implikasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sesuai dengan posisi geografisnya baik di darat maupun di laut, yang memiliki wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga. Oleh karena itu Wawasan Nusantara dalam realita kehidupan bernegara mempunyai implikasi terhadap wilayah darat, laut dan udara. Di dalam fenomena kehidupan, Wawasan Nusantara mempunyai implikasi terhadap kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara.

Peningkatan implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan guna membangun kesadaran politik masyarakat pesisir dalam rangka ketahanan nasional mengandung arah dan pedoman pengelolaan kawasan konservasi perairan yang bertumpu pada perbaikan tatakelola kawasan konservasi perairan, perbaikan ekosistem, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sesuai tujuan nasional Bangsa Indonesia yang diramu dalam satu kesatuan aktivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan secara efektif.

Perbaikan pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan dengan merubah paradigma pengelolaan saat ini menjadi paradigma baru pengelolaan konservasi yang terdesentralisasi dan dikelola dengan sistem zonasi (meliputi: zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya). Perbaikan tatakelola diarahkan kepada penguatan kelembagaan yang meliputi peningkatan sumberdaya manusia; peningkatan kapasitas infrastruktur; penyusunan peraturan pengelolaan kawasan; pengembangan organisasi/kelembagaan masyarakat; pengembangan kemitraan; pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan; dan pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan. Perbaikan ekosistem dilakukan melalui penguatan pengelolaan sumberdaya kawasan yang meliputi upaya perlindungan habitat dan populasi ikan; rehabilitasi habitat dan populasi ikan; penelitian dan pengembangan; pemanfaatan sumberdaya ikan; pariwisata dan jasa lingkungan; pengawasan dan pengendalian; serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui penguatan sosial, ekonomi dan budaya yang meliputi pengembangan sosial ekonomi masyarakat; pemberdayaan masyarakat; serta pelestarian adat dan budaya.

Kawasan Konservasi perairan dapat dijadikan sebagai salah satu alat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif, yaitu melalui pengalokasian sebagian wilayah pesisir dan laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik, kondisi ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan tempat perlindungan bagi sumberdaya ikan, akan berdampak pada peningkatan sumberdaya ikan di wilayah sekitarnya yang merupakan areal penting penangkapan bagi masyarakat pesisir, sehingga dampak konservasi kawasan perairan akan mendukung kegiatan perikanan secara langsung, maupun berbagai pemanfaatan kawasan konservasi yang dikelola berdasarkan sistem zonasi untuk berbagai kepentingan seperti pariwisata bahari dan pendidikan lingkungan yang mampu memperkuat sendi-sendi perekonomian masyarakat pesisir, membangun kesadaran politik dan secara simultan meningkatkan ketahanan nasional bangsa.

Berdasarkan hasil pembahasan konsepsi implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan guna membangun kesadaran politik masyarakat pesisir dalam rangka ketahanan nasional, dapat diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain:

- a. Pembangunan nasional dilaksanakan secara sinergis-terpadu melalui harmonisasi kebijakan dengan paradigma baru yang berorientasi lautan mampu memantapkan implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan kawasan konservasi

secara efektif berbasis sistem zonasi dan terdesentralisasi dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi nasional, regional dan kelestarian lingkungan global.

- b. Implementasi konsepsi Wawasan Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat merupakan solusi peningkatan pemahaman dan semangat kebangsaan, termasuk dalam memahami potensi dan kekayaan sumberdaya laut sehingga tumbuh kesadaran untuk mengelola secara terpadu, jelas dan berkeadilan menggunakan prinsip tatakelola yang baik dan berkelanjutan untuk kepentingan bangsa dan negara. Peningkatan pemahaman wawasan nusantara sebagai wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan mampu meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang membangun kesadaran politik masyarakat pesisir dalam rangka ketahanan nasional.
- c. Optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui konservasi secara berkelanjutan merupakan tanggungjawab bersama semua pihak yang dilaksanakan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek Asta Gatra yang diarahkan untuk memperkuat Ketahanan Nasional dan integral dibangun atas keterlibatan masyarakat serta para pemangku kepentingan dalam suatu komitmen bersama.
- d. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan mampu mengintegrasikan realita (kewilayahan) perairan laut Indonesia, satu kesatuan jejaring daratan kepulauan serta ruang udara dan fenomena (pemanfaatan) mendayagunakan seluruh sumber kekayaan alam, dengan seluruh potensi nasionalnya untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keamanan pada negara kesatuan republik Indonesia.

Peningkatan pemahaman dan penatakelolaan kawasan konservasi perairan melalui penguatan kelembagaan (tatakelola), pengelolaan sumberdaya kawasan (bioekologis) dan pengelolaan sosial, ekonomi masyarakat yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan, dapat tercapai melalui perencanaan pengelolaan dan manajemen zonasi yang baik, tersedianya sumberdaya manusia dan lembaga pengelola yang kompeten, tersedianya infrastruktur dan sarana pendukung yang baik, maupun upaya-upaya pengelolaan kawasan yang dilakukan secara sinergis dan terpadu guna menjamin keberlanjutan sumberdaya perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata, berwawasan nusantara menuju terciptanya ketahanan nasional.

Saran. Beberapa saran yang dapat dikemukakan untuk meningkatkan implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan guna membangun kesadaran politik masyarakat pesisir dalam rangka ketahanan nasional, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemimpin bangsa segera menetapkan kebijakan yang berorientasi kelautan sejalan dengan konsep kebangsaan, mengingat sebuah konsepsi geopolitik yang khas di Indonesia, yang lahir dari falsafah dan ideologi Pancasila serta kondisi, posisi dan potensi wilayah Indonesia yang spesifik berwujud kepulauan dan terletak di jalan silang dunia yang sangat vital. Dengan demikian, pembangunan yang lebih berorientasi ke daratan jelas tidak sejalan dengan konsep negara kebangsaan (Pancasila) dalam Wawasan Nusantara.
- b. DPR, Pemerintah, dan Masyarakat beserta seluruh komponen bangsa perlu menyadari, memahami dan menerapkan wawasan nusantara dalam membangun kesadaran politik masyarakat pesisir terhadap upaya pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar mampu mewujudkan pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam satu kesatuan Ideologi Pancasila dan konstitusional UUD 1945 guna mendorong pencapaian tujuan nasional dalam rangka ketahanan nasional.
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai otoritas pengelolaan (*management authority*) sumberdaya ikan agar secara konsisten mengawal harmonisasi kebijakan di bidang pengelolaan perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dan berupaya mendorong perencanaan pembangunan nasional lebih memihak pada sumberdaya kelautan dan perikanan yang teramat berlimpah, termasuk kewenangan penuh terhadap segala urusan konservasi kawasan di wilayah perairan dan konservasi jenis ikan dilindungi (termasuk perdagangan internasional yang diatur oleh /CITES) yang saat ini kewenangannya masih berada pada Kementerian Kehutanan.
- d. Peran dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan agar lebih fokus terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dengan mengutamakan pengelolaan konservasi kawasan perairan secara efektif serta meningkatkan efisiensi dan revitalisasi industri kelautan dan perikanan menjadi motor penggerak perekonomian bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional untuk mensejahterakan rakyat.